




Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2005



Kerjasama Biro Desentralisasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Bandung 2005

Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2005



Kerjasama Biro Desentralisasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Bandung 2005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dengan telah selesainya kegiatan Analisis dan Pengolahan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan se Jawa Barat. Hasil analisis kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan bahan pertimbangan dalam mendayagunakan seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada para Camat diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga turut mendorong peningkatan pelayanan perangkat kecamatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Untuk itu dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan Analisis dan Pengolahan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan se Jawa Barat bekerjasama dengan Tim dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN-RI.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan serta, khususnya Tim dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN-RI yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Analisis dan Pengolahan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan se Jawa Barat.

Demikian, semoga bermanfaat bagi Daerah, Bangsa dan Negara dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatah.

Bandung, Oktober 2005

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Biro Desentralisasi



Drs. H. SYAMSUDIN ABAS, MM.
Pembina Tingkat I
NI P. 010 081 184

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Output Kegiatan	6
E. Ruang Lingkup Kegiatan	7
 BAB II PENETAPAN STANDAR KINERJA DAN EVALUASI KINERJA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KECAMATAN	 9
A. Peningkatan Peran Kecamatan	9
B. Pentingnya Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja dalam Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan	10
C. Penetapan Indikator, Kriteria Penilaian, dan Instrumen Pengukuran, Sebagai Langkah Awal Penyusunan Standar dan Evaluasi	14
D. Keterkaitan Berbagai Unsur dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan	15
 BAB III KRITERIA PENILAIAN KINERJA KECAMATAN	 18
A. Pengertian Kriteria Penilaian	18
B. Kriteria Penilaian Per Indikator Operasional	19
1. Aspek Administratif	19
2. Aspek Pelayanan	28
3. Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)	33
 BAB IV METODE EVALUASI	 35
A. Konstruksi Indeks Kinerja Kecamatan	35
B. Formula Penilaian	36
 BAB V HASIL PENILAIAN KINERJA KECAMATAN	 40
A. Indeks Kinerja Administratif (IKA)	41
B. Indeks Kinerja Pelayanan (IKP)	41
C. Indeks Kinerja Indikator Makro Pembangunan (IKMP)	41

1. Wilayah Bogor	41
2. Wilayah Cirebon	43
3. Wilayah Priangan	46
4. Wilayah Purwakarta	51
 BAB VI. PERBANDINGAN KINERJA ANTAR KECAMATAN DAN ANTAR DAERAH	54
A. Perbandingan Kinerja Indikator Administratif Untuk Beberapa Kecamatan	54
B. Perbandingan Kinerja Indikator Pelayanan Untuk Beberapa Kecamatan	57
C. Perbandingan Kinerja Indikator Makro Pembangunan Untuk Beberapa Kecamatan	61
D. Perbandingan Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Antar Daerah	65
E. Perbandingan Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Antar Daerah	68
F. Perbandingan Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Antar Daerah	69
 BAB VI PENUTUP	72
 DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Administratif	20
Tabel 3.2	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan Yang Dilakukan Kecamatan	28
Tabel 3.3	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan Dasar di Kecamatan	31
Tabel 3.4	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)	33
Tabel 6.1	Kecamatan Yang Unggul Pada Aspek Administratif	73
Tabel 6.2	Kecamatan Yang Unggul Pada Aspek Pelayanan	73
Tabel 6.3	Kecamatan Yang Unggul Pada Aspek Indikator Makro	74
Tabel 6.4	Kecamatan Yang Unggul Secara Umum	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Evaluasi Kinerja dengan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan	14
Gambar 2.2	Keterkaitan Berbagai Unsur dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan	16
Gambar 4.1	Konstruksi Penetapan Capaian Kinerja Kecamatan	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 6.1.	Rasio jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat terhadap jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota	55
Grafik 6.2.	Rasio jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Kab/Kota kepada Camat terhadap jumlah jabatan struktural yang ada	55
Grafik 6.3.	Rasio jumlah pegawai kecamatan (Sarjana) yang ada terhadap jumlah pegawai kecamatan (Sarjana) yang dibutuhkan	56
Grafik 6.4.	Rasio total anggaran kecamatan (Belanja Publik dan Belanja Aparatur) terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005	56
Grafik 6.5.	Rasio jumlah Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar	58
Grafik 6.6.	Rasio jumlah guru Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar	58
Grafik 6.7.	Rasio jumlah guru SLTP terhadap jumlah anak usia SLTP	59
Grafik 6.8.	Rasio jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005	60
Grafik 6.9.	Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005	60
Grafik 6.10.	Rasio jumlah tenaga kesehatan lainnya terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005	61
Grafik 6.11.	Rasio jumlah penduduk kecamatan tahun 2005 terhadap jumlah penduduk miskin	62
Grafik 6.12.	Rasio murid Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar (Total yang sekolah dan yang tidak sekolah)	63
Grafik 6.13.	Rasio murid SD/MI yang lulus tahun terakhir dan melanjutkan ke SLTP/MTs terhadap murid SD/MI yang lulus tahun terakhir	64
Grafik 6.14.	Rasio jumlah penduduk yang ikut memilih terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	64

Grafik 6.15. Rasio nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan terhadap potensi PBB yang dimiliki kecamatan	65
Grafik 6.16. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Bogor	66
Grafik 6.17. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Cirebon	66
Grafik 6.18. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Priangan	67
Grafik 6.19. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Purwakarta	67
Grafik 6.20. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Bogor	68
Grafik 6.21. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Cirebon	68
Grafik 6.22. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Priangan	69
Grafik 6.23. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Purwakarta	69
Grafik 6.24. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Bogor	70
Grafik 6.25. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Cirebon	70
Grafik 6.26. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Priangan	71
Grafik 6.27. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Purwakarta	71

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah yang dikemas dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sangat luas. Implikasi dari kebijakan tersebut, berbagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah pun mengalami perubahan.

Seiring dengan perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menuju kepada iklim yang lebih demokratis, serta karena berbagai kelemahan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka pada Tahun 2004, Pemerintah mengganti UU tersebut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Diantara kelemahan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan yang dinilai terlalu luas kepada Daerah Kabupaten/Kota, sehingga peran Pusat dan Propinsi di Kabupaten/Kota menjadi sangat minim. Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 mencoba mengakomodasi iklim demokratisasi yang lebih luas dan mengurangi kelemahan hubungan hirarkial antara berbagai tingkatan pemerintahan tersebut.

Baik UU Nomor 22 Tahun 1999 ataupun UU Nomor 32 Tahun 2004, dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah daerah berusaha meningkatkan kapasitasnya dengan memperkuat fungsi dan peranannya serta meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab (*good governance*). Usaha tersebut diharapkan pula dapat mendorong proses demokratisasi dan kemandirian daerah, sehingga terwujud cita-cita masyarakat madani (*civil society*).

Penerapan kebijakan Otonomi Daerah tersebut memberikan peluang pada daerah kabupaten dan kota untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam manajemen pemerintahannya. Salah satu perubahan yang diusung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah perubahan status atau kedudukan

Kecamatan, Kecamatan bukan lagi sebagai instansi vertikal dan pemerintahan wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Tetapi Kecamatan menjadi Aparat Daerah yang menjalankan kewenangan-kewenangan dari Daerah Kabupaten / Kota sebagai Daerah otonom seperti yang tertera dalam Pasal 66 ayat 1 bahwa "Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan". Namun demikian Kecamatan akan tetap menyandang titel sebagai Instansi vertikal namun bukan instansi vertikal Pemerintah Pusat tetapi instansi vertikal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kecamatan diposisikan sebagai aparat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas yang merupakan tugas sebagai Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Konsekuensi logisnya sebagai Aparat Daerah sehingga Pemerintah Kecamatan juga harus melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan Bupati atau pun Walikota, hal ini dinyatakan dalam Pasal 66 Ayat 4 : "*Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota*". Konsepsinya Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan tugas-tugas dan fungsi *dekonsentrasi* atau menerima delegasi sebagian kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya perubahan kedudukan Kecamatan tersebut, sehingga diposisikan sebagai ujung tombak pemerintah kabupaten atau kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengadakan pembangunan di daerah. Dimilikinya status baru ini merubah peran dan fungsi pemerintah kecamatan sebelumnya. Peran dan fungsi Pemerintahan mengalami reposisi ulang lebih menekankan pada aspek-aspek strategis pemerintahan yang adaptif dengan tingkat perkembangan dan peradaban dari suatu masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus diemban oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kecamatan perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor atau bidang. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, untuk itu pemerintah kecamatan perlu di reform untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Perubahan yang perlu dilakukan dalam Pemerintahan Kecamatan meliputi:

1. Kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan didasarkan pada karakteristik dan potensi yang ada.
2. Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan yang dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan.

3. Jenis layanan yang sebaiknya digeser ke Pemerintah Kecamatan supaya lebih efektif dan efisien.

Reformasi yang menyangkut Pemerintahan Kecamatan dibutuhkan mengingat masih adanya beberapa kendala atau fenomena-fenomena di daerah sebagai berikut:

- a. Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan masih bersifat homogen atau seragam sedangkan potensi dan karakteristik Kecamatan satu dengan yang lain beragam.
- b. Masih adanya keraguan dan keengganan untuk mendelegasikan kewenangan ke Pemerintahan Kecamatan karena akan mengurangi kewenangan Perangkat Daerah yang lain (Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah).
- c. Masih minimnya jenis pelayanan yang didelegasikan ke Kecamatan padahal Kecamatan dengan Pemerintahan Kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam berhadapan dengan masyarakat.

Pasal 126 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
6. Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kecamatan terdiri dari satu Sekretariat, sebanyak-banyaknya lima Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, mengingat camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota tertinggi di wilayah kecamatan serta untuk menghindari terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa:

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawabannya administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.
- b. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 12 PP No. 8 Tahun 2003 tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Dalam pasal 2 ayat (2) Kepmendagri tersebut disebutkan bahwa camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 tersebut, ditetapkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan pemerintah dimaksud berpedoman pada lampiran I tentang Pedoman Rincian Sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat, yaitu meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Pertanahan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan melainkan sebagai lingkungan kerja, sehingga Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah Administrasi, melainkan sebagai perangkat daerah. Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 terdiri dari Unsur Pembantu Pimpinan (Setda), Unsur Pelaksana (Dinas Daerah) dan Unsur Auxiliary (Lemtekda), Kecamatan tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi dilihat dari karakteristiknya memberikan pelayanan langsung di suatu wilayah kerja tertentu. Dengan demikian kecamatan merupakan unsur lini kewilayahan.

Adanya perubahan kewenangan Camat yang tadinya bersifat atributif (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974) menjadi bersifat delegatif yaitu menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala antara lain belum adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan penataan Kecamatan, khususnya mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, sebagai akibat belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selain itu dalam pelaksanaannya belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta

dukungan personil, pembiayaan dan perlengkapan (3P) dalam pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pengolahan dan analisis dimaksud adalah untuk mengidentifikasi kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan dalam aspek administratif (Kelembagaan, Kewenangan, Perlengkapan, Pembiayaan, Personil dan Dokumentasi), outputs (pelayanan) dan outcomes (beberapa indikator makro pembangunan) sebagai upaya Pemerintah Propinsi dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di daerah kabupaten/kota khususnya di kawasan Kecamatan.

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu:

- Tersedianya bahan dalam mengukur dan menilai keberhasilan pembangunan di Kecamatan dan memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan permasalahan serta dapat mengetahui dengan jelas tentang kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tersedianya bahan fasilitasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai instrumen dalam mendorong kompetisi dalam meningkatkan kinerja pembangunan antar Kecamatan dan antar Kabupaten/Kota.

D. OUTPUT KEGIATAN

Output dari kegiatan ini adalah indeks kinerja Kecamatan yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dilihat dari dimensi administratif, pelayanan dan kinerja indikator makro pembangunan.

Disamping itu output kegiatan ini juga dilengkapi dengan analisis deskriptif indeks kinerja Kecamatan dan kategorisasi Kecamatan berdasarkan indeks tersebut.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pengolahan dan Analisis hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Data Umum, meliputi:
 - a. Jumlah penduduk Kecamatan 3 tahun terakhir, luas wilayah Kecamatan, Jumlah Desa, Kelurahan, RT, RW.
 - b. Mata pencaharian penduduk (dalam %).
2. Aspek Administratif, meliputi:
 - a. Kewenangan, yaitu mengenai jumlah, jenis dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan dan cara pelaksanaannya serta pembiayaannya dll.
 - b. Kelembagaan, yaitu berkaitan dengan jabatan struktural dan kelembagaan lain yang ada di Kecamatan.
 - c. Kepegawaian, yaitu anggaran jumlah pegawai kecamatan dan pendidikannya, jumlah PNS yang dibutuhkan dan upaya kesejahteraan.
 - d. Pendanaan, yaitu anggaran yang dikelola langsung oleh Kecamatan (Belanja Publik dan Belanja Aparatur) dan dana-dana lain baik swadaya masyarakat maupun dana lainnya (program pembantuan).
 - e. Perlengkapan, yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan dan instansi teknis lainnya yang ada di Kecamatan, Sistem Administrasi, Kearsipan, tata naskah dan dokumentasi termasuk pemanfaatan teknologi komputer dan publikasi/sosialisasi kebijakan dan program di Kecamatan.
3. Aspek Pelayanan, yaitu pelayanan yang dilakukan Kecamatan, meliputi jumlah dan jenis layanan langsung yang diberikan Kecamatan, pelayanan pembuatan KTP per Tahun, produk hukum/keputusan Camat yang bersifat mengatur masyarakat dan layanan instansi teknis lain yang ada di Kecamatan serta bentuk-bentuk fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Kecamatan kepada instansi/organisasi/perusahaan dan Desa/Kelurahan termasuk pelaksanaan rapat koordinasi.
4. Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a. Bidang pendidikan (jumlah SD/SLTP/SLTA, anak usia SD, Guru SD/SLTP/SLTA)
 - b. Bidang kesehatan (jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta penduduk yang memiliki Kartu Sehat)

- c. Sarana dan prasarana umum (telepon, listrik, jalan aspal, kantor pos)
 - d. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diberikan Kabupaten/Kota
 - e. Sistem pengelolaan kebersihan lingkungan
 - f. Pengelolaan sumber daya produktif
5. Aspek Indikator Makro Pembangunan, meliputi:
- a. Bidang Ekonomi, yaitu total pendapatan masyarakat di Kecamatan per tahun, nilai pendapatan rata-rata masyarakat per tahun, jumlah penduduk miskin, desa tertinggal, jumlah usia kerja, jumlah pengangguran.
 - b. Bidang Pendidikan (jumlah usia sekolah dasar, murid dan jumlah yang lulus SD/SLTP/SLTA tahun terakhir dll).
 - c. Bidang Kesehatan (jumlah bayi yang lahir/meninggal dan rata-rata usia penduduk).
 - d. Bidang Politik (jumlah hak pilih, yang ikut memilih dan jumlah Dewan Pimpinan Parpol yang ada di Kecamatan).
 - e. Bidang Pemerintahan (Partisipasi Pembangunan), meliputi nilai, jenis dan potensi pajak daerah dan PBB.
 - f. Bidang Budaya dan lainnya (jumlah lembaga kemasyarakatan, kesenian dan budaya daerah dll).

Pekerjaan Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Kinerja Kecamatan dimaksud yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan konsepsi model pemberdayaan Kecamatan di Jawa Barat;
2. Pengelompokkan dan pengklasifikasian Kecamatan;
3. Pengolahan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Jawa Barat;
4. Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Jawa Barat.
5. Penyajian/presentasi hasil Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan;
6. Penyempurnaan hasil Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan sesuai masukan dan tanggapan yang disampaikan;
7. Penyusunan Laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PENETAPAN STANDAR KINERJA DAN EVALUASI KINERJA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KECAMATAN

A. PENINGKATAN PERAN KECAMATAN

Penerapan kebijakan desentralisasi yang didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, memberikan peluang pada daerah Kabupaten dan Kota untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam manajemen pemerintahannya. Salah satu Perubahan yang diusung oleh UU ini adalah perubahan Status atau kedudukan Kecamatan, Kecamatan bukan lagi sebagai instansi vertikal dan pemerintahan wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat, sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, tetapi Kecamatan menjadi Aparat Daerah yang menjalankan kewenangan-kewenangan dari Daerah Kabupaten / Kota.

Perubahan kedudukan Kecamatan sebagaimana disebutkan, tidak terlepas dari amanat UU 32 Tahun 2004 dan kecenderungan paradigma pemerintahan yang berpandangan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Karena itu, Tugas dan fungsi kecamatan menurut paradigma ini, dan pada masa yang akan datang akan lebih berperan dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Pemerintah Kecamatan diposisikan sebagai aparat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Konsekuensi logisnya, sebagai Aparat Daerah maka Pemerintah Kecamatan juga harus melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan Bupati atau pun Walikota pada tingkat yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, kedudukan Kecamatan adalah sebagai ujung tombak pemerintah Kabupaten atau Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengadakan pembangunan di daerah. Dimilikinya status baru ini merubah peran dan fungsi pemerintah Kecamatan sebelumnya.

Dengan adanya perubahan ini, maka tugas kecamatan di masa yang akan datang akan mengalami perluasan, yaitu tidak hanya pada tugas-tugas administratif yaitu pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat, tapi juga

termasuk tugas-tugas substantif, yang menyangkut pelayanan umum dan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus diemban, Pemerintah Kecamatan perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor atau bidang. Perubahan-perubahan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perubahan yang perlu dilakukan dalam Pemerintahan Kecamatan antara lain berkaitan dengan: (1) Kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan harus didasarkan pada karakteristik dan potensi yang ada; (2) Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan harus dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan; (3) Beberapa jenis layanan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas, Badan, Lembaga) sebaiknya digeser ke Pemerintah Kecamatan supaya lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya pembenahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, karena Kecamatan dinilai sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di Daerah.

Dalam kenyataan sering kali penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di Kecamatan masih belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya standar baku kinerja Kecamatan, sehingga penilaian kinerja Kecamatan menjadi tidak objektif, dan umpan balik (*feedback*) dari hasil evaluasi tersebut tidak memberikan koreksi yang signifikan bagi perbaikan kinerja Kecamatan. Dalam konteks inilah, penetapan standar kinerja, dan evaluasi kinerja secara objektif perlu dilakukan pada Tingkat Kecamatan.

B. PENTINGNYA STANDAR KINERJA DAN EVALUASI KINERJA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KECAMATAN

Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu kebijakan dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana,

memfasilitasi modifikasi dan penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program.

Terjadi interaksi antara formulasi dengan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program serta ketetapan atau keputusan dan evaluasi tentang kualitas program. Kebijakan diformulasikan untuk memandu dan menetapkan arah pelaksanaan program. Akan tetapi, karena operasionalisasi program merupakan sasaran interpretasi suatu kebijakan, dan berkorelasi erat dengan kemampuan adaptasi individual, maka pelaksanaan program bukanlah suatu cerminan akurat dari suatu pedoman kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dan pelaksanaan program selanjutnya dikombinasikan untuk menghasilkan kualitas aktual program (atau kualitas operasional organisasi). Melalui proses evaluasi suatu kualitas program dinilai. Hal ini dapat dilakukan baik melalui proses yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Meskipun harus diakui pula bahwa masing-masing pola tersebut hanya mampu menetapkan sebagian dari total kualitas pelaksanaan program dan dampaknya. Setelah melalui fase penilaian, dari serangkaian proses evaluasi dilakukan pengambilan keputusan tentang sebaik apa kualitas kebijakan dan pelaksanaan programnya. Untuk itu diperlukan model evaluasi yang tepat, indikator kinerja dan besarnya yang disepakati, tujuan atau obyektif yang jelas dan standar yang diterapkan serta luasnya rentang nilai faktor-faktor yang lain. Dengan demikian akan diperoleh keputusan tentang nilai kualitas integratif.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan. Langkah berikutnya adalah menerapkan keputusan yang telah ditetapkan dengan melanjutkan atau mengubah kebijakan yang ada, mengeliminasi, meluaskan atau memodifikasi operasi pelaksanaan program.

Sudut pandang tersebut, dinilai telah berkorespondensi dengan pandangan tradisional tentang peran evaluasi dalam pengembangan suatu program. Dilihat dari sudut yang lain, sebagai contoh, evaluasi kualitas yang telah dibuktikan atau yang belum dibuktikan kebenarannya dapat mengantarkan kepada penilaian yang mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk intervensi baru ke dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Jadi peran penilaian dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu evaluasi. Oleh karena itu, intervensi baru — yang dapat berupa kebijakan, strategi, dan lain-lain— seyogyanya dinilai dan dievaluasi setelah diimplementasikan serta menjadi subyek atau acuan untuk dilanjutkan atau dimodifikasinya suatu aksi.

Dalam konteks ini, pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan diperlukan agar kinerja pelayanan terhadap masyarakat makin meningkat dan kualitas kehidupan masyarakat yang dicerminkan oleh indikator-indikator makro pembangunan sebagai *outcome* makin membaik. Dengan kata lain, jika evaluasi tidak dilakukan, atau evaluasi dilakukan dengan cara yang tidak objektif maka mustahil terjadi perbaikan kinerja kecamatan di masa yang akan datang.

Salah satu faktor penentu keberhasilan evaluasi kinerja adalah adanya standar kinerja yang memadai. Standar kinerja merupakan patokan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Sedangkan pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu bagian dari proses manajemen yang ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dimana letak kekurangan yang terjadi. Tanpa standar kinerja, tidak mungkin suatu pengukuran dan evaluasi dapat dilakukan dengan objektif. Sebagaimana dikatakan oleh Berry, Zeithaml dan Parasuraman (Lovelock, 1992; 225) bahwa yang menjadi potensi terjadinya kegagalan peningkatan pelayanan publik antara lain: *No service standard; Too Many service Standard, General Service standard; Poorly communicated service standard; Service Standard unconnected to the performance measurement.*

Dari apa yang dikemukakan oleh Berry, Zeithaml dan Parasuraman tersebut nampak bahwa standar merupakan faktor kunci untuk menentukan keberhasilan peningkatan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja kecamatan merupakan langkah yang dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan pengukuran terhadap kinerja pembangunan di Kecamatan. Pengukuran (proses mengukur) adalah membandingkan kondisi riil dengan alat ukur. Alat ukur tidak lain dari standar kinerja. Dengan demikian, sebelum dilakukan penilaian, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran, dan sebelum dilakukan pengukuran perlu terlebih dahulu dibuat standar.

Unit analisis dari evaluasi ini adalah Kecamatan. Dengan demikian, evaluasi kinerja Kecamatan berarti mengukur kinerja pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kecamatan, bukan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan saja. Implikasi dari hal ini, peran Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat tetap menjadi objek evaluasi. Hal ini perlu dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa Kecamatan bukan merupakan daerah otonom melainkan perangkat daerah yang kewenangannya tergantung kepada pendelegasian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan untuk saat ini, di daerah-daerah tertentu

kewenangan Kecamatan hanya bersifat fasilitatif dan koordinatif, sedangkan yang melaksanakannya adalah instansi teknis daerah.

Dalam kaitan ini, penetapan standar kinerja kecamatan bermanfaat dalam rangka:

1. Mengidentifikasi kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan dalam aspek administratif (Kelembagaan, Kewenangan, Perlengkapan, Pembiayaan, Personil dan Dokumentasi), outputs (pelayanan), dan outcomes (beberapa indikator makro pembangunan).
2. Upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Daerahnya (dalam hal ini yang menjadi lokus pembangunan sebenarnya adalah Kecamatan).
3. Sebagai bahan referensi bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur terhadap Kecamatan, sehingga Daerah Kabupaten maupun Kota mampu mengaktualisasikan secara cermat aturan-aturan yang diimplementasikan secara simultan dan berkelanjutan di Kecamatan.
4. Secara konsisten Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kinerja pembangunan di kecamatan yang didasarkan kepada kinerja administrative (input), pelayanan (output), dan kinerja indikator makro pembangunan (outcomes).
5. Sebagai bahan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam mengukur dan menilai keberhasilan pembangunannya di Kecamatan
6. Untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
7. Untuk mengetahui dengan jelas tentang kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Untuk dijadikan pendorong dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Sebagai instrument dalam mendorong kompetisi dalam meningkatkan kinerja pembangunan antar kecamatan.



Gambar 2.1

Hubungan Evaluasi Kinerja Dengan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan

C. PENETAPAN INDIKATOR, KRITERIA PENILAIAN, DAN INSTRUMEN PENGUKURAN, SEBAGAI LANGKAH AWAL PENYUSUNAN STANDAR DAN EVALUASI

Penetapan standar tidak mungkin dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja Kecamatan. Indikator adalah hal-hal yang menjadi objek pengukuran dan evaluasi dari setiap aspek kinerja Kecamatan yang meliputi aspek administratif atau input (kewenangan, kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan, serta dokumentasi dan kearsipan), aspek *outputs* (pelayanan), dan aspek *outcomes* (indikator makro pembangunan). Dalam hal ini, setiap aspek kinerja pembangunan kecamatan harus ditetapkan indikatornya.

Setelah indikator ditemukan, perlu ditetapkan kriteria penilaian (evaluasi). Kriteria menunjukkan kualifikasi yang dimiliki oleh suatu indikator untuk dimasukkan ke dalam suatu kategori atau klasifikasi tertentu. Dengan demikian, kriteria bersifat gradasi, ketika semakin jauh dari standar yang ditentukan. Dengan demikian, tanpa adanya standar, maka penetapan kriteria pun menjadi tidak jelas. Disinilah sekali lagi letak pentingnya standar kinerja Kecamatan.

Setelah indikator dan standar ditetapkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebelum evaluasi adalah penggalan data dan informasi. Data dan informasi hanya dapat digali dengan instrumen yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali data dan informasi berkaitan dengan setiap indikator kinerja Kecamatan. Data untuk setiap indikator sangat mungkin diterjemahkan ke dalam lebih dari satu instrumen. Baru setelah instrumen dibuat, penggalan data dilakukan, lalu pengukuran dilakukan, dan pada akhirnya dilaksanakan evaluasi kinerja.

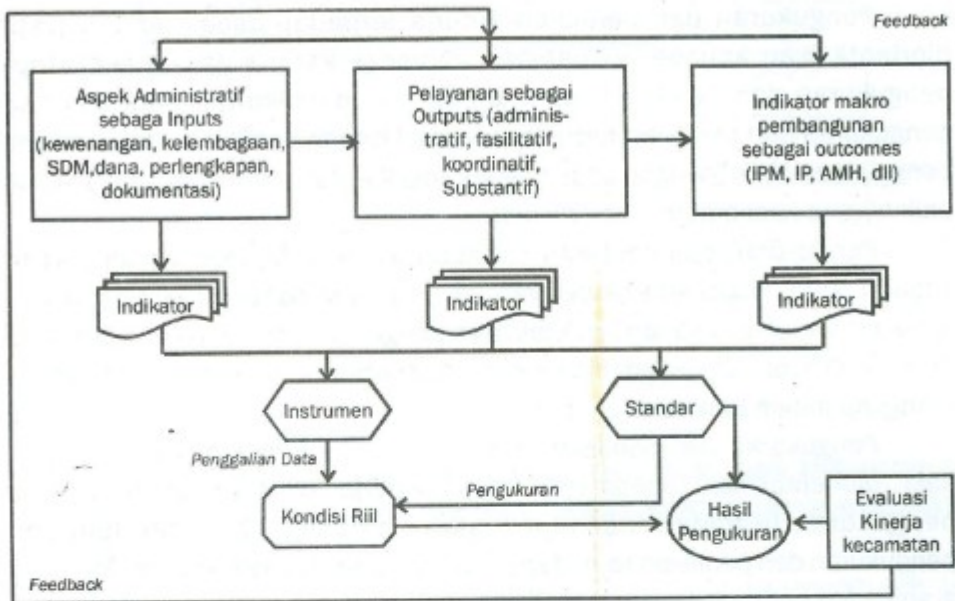
Pengukuran dan penilaian kinerja terhadap aspek administratif diorientasikan kepada pencapaian efisiensi, karena pada hakekatnya pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *inputs*. Dengan demikian, makin efisien penggunaan *input* (dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan) maka makin baik kinerja kecamatan yang dicapai.

Pengukuran dan penilaian terhadap aspek pelayanan diorientasikan kepada optimalisasi kinerja pelayan, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap aspek pelayanan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outputs*. Dengan demikian, makin besar *outputs* atau potensi *outputs*, maka dianggap makin baik kinerja Kecamatan.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator makro pembangunan, juga diorientasikan kepada optimalisasi kinerja, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap indikator makro pembangunan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outcomes*. Dengan demikian, makin tinggi atau makin optimal *outcomes* atau potensi *outcomes*, maka dianggap makin baik kinerja Kecamatan.

D. KETERKAITAN BERBAGAI UNSUR DALAM PROSES EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat berbagai hal yang terkait dengan proses evaluasi kinerja Kecamatan dalam upaya peningkatan kapasitas organisasi Kecamatan. Berikut ini, digambarkan keterkaitan berbagai unsur yang terkait dengan proses evaluasi kinerja Kecamatan, serta melihat posisi penting standar kinerja dalam rangkaian proses evaluasi tersebut.



Gambar 2.2:
Keterkaitan Berbagai Unsur Dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses evaluasi kinerja kecamatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan terhadap 3 aspek penting, yang meliputi aspek *inputs* (sumber daya), aspek *outputs* (kinerja pelayanan), dan aspek *outcomes* (indikator makro pembangunan).
2. Penetapan indikator yang akan diukur dan dievaluasi untuk setiap aspek. Aspek *inputs* meliputi kelompok indikator kewenangan, kelembagaan, SDM, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi. Aspek *outputs* meliputi pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan dan oleh instansi teknis yang ada di Kecamatan berupa pelayanan administratif, fasilitatif, koordinatif, dan substantif. Sedangkan penilaian terhadap aspek *outcomes* meliputi antara lain indikator bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan indikator lainnya.
3. Menetapkan standar kinerja. Karena sasaran evaluasi ditujukan kepada 3 aspek dengan berbagai indikatornya, maka standar kinerja Kecamatan perlu ditetapkan berkaitan dengan ketiga aspek dengan indikator-indikatornya tersebut.

4. Pembuatan instrumen penggal data dan informasi. Instrumen ini diperlukan untuk menjangkau data dan informasi berkaitan dengan semua indikator yang ada pada ketiga aspek yang telah ditetapkan tersebut;
5. Jika instrumen telah dibuat, baru dapat dilakukan proses penggalan data dan informasi.
6. Dan setelah data dan informasi berkaitan dengan kondisi riil dari ketiga aspek beserta indikatornya tersebut terkumpul, baru dapat dilakukan pengukuran kinerja, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi riil dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Terakhir baru berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kinerja kecamatan sudah baik atau masih kurang. Hasil evaluasi merupakan *feedback* bagi perbaikan kinerja kecamatan di masa yang akan datang. Dari sini nampak bagaimana letak pentingnya evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kapasitas organisasi Kecamatan.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

A. PENGERTIAN KRITERIA PENILAIAN

Evaluasi kinerja kecamatan merupakan langkah yang dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan pengukuran terhadap kinerja pembangunan di Kecamatan. Pengukuran (proses mengukur) adalah membandingkan kondisi riil dengan alat ukur. Alat ukur tidak lain dari standar pengukuran. Dengan demikian, sebelum dilakukan penilaian, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran, dan sebelum dilakukan pengukuran perlu terlebih dahulu dibuat standar pengukuran. Dan sebelum dilakukan pengukuran perlu dibuat instrument untuk melakukan pengukuran.

Unit analisis dari evaluasi ini adalah Kecamatan. Dengan demikian, evaluasi kinerja Kecamatan berarti mengukur kinerja pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kecamatan, bukan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan saja. Implikasi dari hal ini, peran Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat tetap menjadi objek evaluasi, namun tidak dimunculkan secara eksplisit. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa Kecamatan bukan merupakan Daerah Otonom melainkan perangkat daerah yang kewenangannya relative terbatas, bahkan untuk daerah-daerah tertentu hanya bersifat fasilitatif dan koordinatif, sedangkan yang melaksanakannya adalah instansi teknis daerah.

Indikator adalah hal-hal yang menjadi objek pengukuran dari setiap aspek kinerja Kecamatan yang meliputi aspek administratif atau *input* (kewenangan, kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan, serta dokumentasi dan kearsipan), aspek *outputs* (pelayanan), dan aspek *outcomes* (indikator makro pembangunan). Dalam hal ini, setiap aspek kinerja pembangunan Kecamatan mempunyai beberapa indikator secara bervariasi, yang dianggap mewakili untuk mengukur aspek tersebut. Indikator operasional merupakan turunan dari indikator yang dapat diukur secara operasional dalam bentuk kuantitatif dalam skala rasio, interval, atau ordinal (tidak ada yang bersifat nominal).

Hasil evaluasi terhadap "kinerja Kecamatan" merupakan suatu predikat yang diberikan kepada masing-masing Kecamatan atas kinerjanya. Untuk memberikan predikat kepada masing-masing Kecamatan tersebut, maka diperlukan "suatu nilai" yang diberikan kepada masing-masing Kecamatan,

sebagai patokan pemberian predikat tersebut. Penilaian baru bisa dilakukan apabila variasi nilai menunjukkan variasi kualitas. Atas dasar variasi nilai inilah ditetapkan kriteria penilaian. Jadi, **kriteria penilaian menunjukkan** kualifikasi yang dimiliki oleh suatu indikator operasional untuk dimasukkan ke dalam suatu kategori atau klasifikasi nilai tertentu. Misalnya, makin tinggi nilai suatu indikator, makin tinggi kualitas kinerja Kecamatan, atau makin rendah nilai suatu indikator makin rendah kualitas kinerja Kecamatan tersebut.

Selanjutnya, pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif diorientasikan kepada pencapaian efisiensi, karena pada hakekatnya pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *inputs*. Dengan demikian, makin efisien penggunaan *input* (dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan) maka makin baik kinerja Kecamatan yang dicapai.

Pengukuran dan penilaian terhadap aspek pelayanan diorientasikan kepada optimalisasi kinerja pelayan, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap aspek pelayanan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outputs*. Dengan demikian, makin besar *outputs* atau potensi *outputs*, maka dianggap makin baik kinerja Kecamatan.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator makro pembangunan, juga diorientasikan kepada optimalisasi kinerja, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap indikator makro pembangunan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outcomes*. Dengan demikian, makin tinggi atau makin optimal *outcomes* atau potensi *outcomes*, maka dianggap makin baik kinerja Kecamatan.

B. KRITERIA PENILAIAN PER INDIKATOR OPERASIONAL

1. Aspek Administratif

Aspek administratif merupakan aspek pertama yang diukur dan dinilai. Ada 6 (enam) indikator yang dinilai dalam aspek ini, yaitu indikator kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Administratif

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Kewenangan	Jumlah kewenangan total yang dilimpahkan dari kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Makin banyak jumlah kewenangan yang diterima, makin berat beban kerja kecamatan, yang berarti makin tinggi kinerja kecamatan tersebut
	Jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Makin banyak jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan, makin baik
	Rasio jumlah kewenangan terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini mengindikasikan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh setiap pegawai kecamatan Makin tinggi rasio jumlah kewenangan terhadap pegawai, makin tinggi kinerja kecamatan yang bersangkutan
	Rasio jumlah kewenangan terhadap anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran tahunan menunjukkan modal kerja yang dimiliki oleh kecamatan Rasio ini mengindikasikan jumlah kewenangan yang harus dibiayai oleh setiap rupiah anggaran Makin tinggi rasio ini berarti makin efisiensi pelaksanaan kewenangan, sehingga makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah kewenangan terhadap sarpras (asset) yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> Asset dinilai dengan Rupiah dan menunjukkan modal tetap yang dimiliki kecamatan Rasio ini menunjukkan jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan setiap satu rupiah asset yang dimiliki Makin tinggi rasio ini makin efisien penggunaan asset oleh kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan tersebut
	Rasio jumlah kewenangan yang tidak berduplikasi terhadap total kewenangan yang dimiliki kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan ketidakjelasan dalam pelimpahan kewenangan. Meskipun merupakan kinerja Daerah Kabupaten/ Kota, namun dampaknya dirasakan oleh kecamatan, sehingga relevan untuk diukur sebagai bagian dari kinerja kecamatan (bukan kinerja camat) Makin banyak kewenangan yang duplikasi dengan instansi teknis, makin tidak baik kinerja kecamatan. Atau makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan mampu untuk dilaksanakan terhadap total kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun factor penyebab ketidakmampuan kecamatan dalam melaksanakan kewenangan ditentukan oleh berbagai factor yang diantaranya political will Bupati dalam melimpahkan sumber daya, namun

		<p>bagaimanapun akan berdampak terhadap kinerja kecamatan (bukan camat).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan.
	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dengan swadaya murni masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan kemampuan camat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, yang diukur secara absolut • Semakin banyak jumlah kewenangan yang dilaksanakan secara swadaya, semakin baik kinerja kecamatan
	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan swasta setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan kemampuan Camat dalam menggali potensi yang ada di "wilayahnya". • Untuk hal ini misalnya dalam perbaikan jalan lingkungan (gang), dll. • Makin banyak kerjasama dengan swasta, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini juga menunjukkan kemampuan Camat dalam menggali potensi yang ada di "wilayahnya". • Contoh untuk hal ini juga perbaikan jalan lingkungan (gang), dll. • Makin banyak kerjasama dengan masyarakat (tokoh masyarakat), makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah kewenangan yang dalam pelaksanaan pembiayaannya bekerjasama antara instansi teknis dengan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun yang melaksanakan kegiatan bukan Camat (kecamatan), tetapi indikator ini menunjukkan kemampuan camat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga dapat bekerjasama dengan instansi teknis dalam melaksanakan pembangunan di kecamatannya • Makin banyak jumlah kewenangan ini, makin baik kinerja kecamatan.
2. Kelembagaan	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap kewenangan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pola maksimal kelembagaan kecamatan telah ditentukan oleh Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 yaitu terdiri dari Camat, Sekretaris, dan 5 seksi ditambah jabatan fungsional. Namun demikian, tidak ada pola minimum, sehingga jumlah seksi boleh 3 atau 4. • Apabila jumlah kewenangan sama, maka makin sedikit jabatan struktural yang ada berarti makin efisien, dan makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan kemampuan pejabat struktural dalam melayani masyarakat • Makin rendah rasio ini berarti makin banyak jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh setiap pejabat struktural di kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan

Rasio jumlah jabatan structural terhadap jumlah desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan pejabat structural dalam melayani desa/kelurahan Makin rendah rasio ini berarti makin banyak jumlah desa yang dapat dilayani oleh setiap pejabat structural di kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah jabatan structural terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan pejabat structural dalam menjangkau pelosok-pelosok desa/kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makin rendah rasio ini berarti makin luas wilayah yang dapat dijangkau oleh setiap pejabat structural di kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah jabatan structural terhadap jumlah dana yang bersumber dari swadaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi SDM dalam memanfaatkan dana Makin tinggi rasio ini berarti makin sedikit dana rata-rata yang digunakan oleh pejabat structural, sehingga makin efisien dan makin baik kinerja kecamatan
Jumlah kelembagaan kecamatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kreativitas kecamatan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Makin banyak kelembagaan kecamatan atau desa/kelurahan yang dimiliki dan dibiayai secara swadaya, maka makin baik kinerja kecamatan tersebut.
Keterlibatan camat dalam penyusunan kelembagaan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Jika camat dilibatkan dalam penyusunan kelembagaan kecamatan, maka kinerja kecamatan baik. Sebaliknya jika tidak dilibatkan
3. SDM	
Rasio Jumlah Jabatan Fungsional terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen kecamatan dan kabupaten/kota untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Makin banyak jumlah jabatan fungsional, makin baik kinerja kecamatan.
Rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan terhadap masyarakat Makin rendah rasio ini, makin tinggi jangkauan dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.
Rasio jumlah pegawai terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan kemampuan pegawai dalam menjangkau pelosok-pelosok wilayah kecamatan Makin rendah rasio ini, makin tinggi kemampuan pegawai dalam menjangkau pelosok-pelosok kecamatan.

Rasio pegawai terhadap Jumlah kelurahan dan desa	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan, sosialisasi, dsb terhadap desa/kelurahan Makin rendah rasio ini, makin tinggi kemampuan pegawai dalam memberikan layanan dan sosialisasi terhadap desa/kelurahan.
Rasio jumlah pegawai terhadap anggaran anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan dana per pegawai. Makin tinggi rasio ini, makin efisien pemanfaatan dana yang dimiliki
Rasio jumlah PNS yang ada di kecamatan (bukan hanya pegawai kecamatan) terhadap jumlah PNS yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai di kecamatan Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil Golongan I terhadap jumlah pegawai golongan I yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan I di kecamatan Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil Golongan II terhadap jumlah pegawai golongan II yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan II di kecamatan Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil Golongan III terhadap jumlah pegawai golongan III yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan III di kecamatan Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil Golongan IV terhadap jumlah pegawai golongan IV yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan IV di kecamatan Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai.

	<p>Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil berpendidikan S1 ke atas terhadap jumlah pegawai berpendidikan S1 ke atas yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai S1 ke atas di kecamatan • Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai • Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil berpendidikan Diploma terhadap jumlah pegawai berpendidikan Diploma yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai Diploma di kecamatan • Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai • Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai riil berpendidikan SLTA ke bawah terhadap jumlah pegawai berpendidikan SLTA ke bawah yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai SLTA ke bawah di kecamatan • Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai • Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai Kecamatan yang sudah mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim) terhadap seluruh pegawai kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai kecamatan yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional terhadap seluruh pegawai kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai PEMDA yang ada di Kecamatan yang sudah mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim) terhadap seluruh pegawai PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai PEMDA yang ada di kecamatan yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional terhadap seluruh pegawai PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan

Lamanya pengalaman camat menduduki jabatan camat	<ul style="list-style-type: none"> • Makin lama makin baik kinerja kecamatan
Banyaknya wilayah yang camat pernah melaksanakan tugas di wilayah tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Makin banyak makin baik kinerja kecamatan
Rata-rata waktu yang diperlukan untuk kenaikan pangkat	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam melakukan pengembangan karier pegawai di kecamatan. Selain itu, menunjukkan komitmen Camat juga dalam mengusulkan bawahannya untuk promosi. • Makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat, makin baik kinerja kecamatan
Rata-rata waktu yang diperlukan untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam melakukan pengembangan karier pegawai di kecamatan. Selain itu, menunjukkan komitmen Camat juga dalam melakukan pembinaan karier terhadap bawahannya. • Makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat, makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin terhadap jumlah keseluruhan pegawai di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahannya. • Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah pegawai terhadap jumlah koperasi PNS di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dan Camat dalam melakukan pembinaan kesejahteraan terhadap bawahannya dan pegawai lain yang ada di kecamatan • Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Jumlah penerimaan lain yang legal yang dipergunakan untuk kesejahteraan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Makin besar, makin baik kinerja kecamatan. • Sumber penerimaan ini bisa dari: kabupaten/kota, internal kecamatan, upah pungut sebagai mediator, atau lainnya.
Rasio jumlah belanja aparatur terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan dana per kapita pegawai. • Makin kecil rasio ini (dengan asumsi pelayanan tetap), maka makin efisien pemanfaatan dana dan makin baik kinerja kecamatan
4. Pendanaan Rasio jumlah belanja publik terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. • Makin tinggi rasio ini berarti makin besar alokasi belanja publik perkapita, yang berarti makin tinggi komitmen PEMDA terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kinerja kecamatan dianggap makin baik.

Rasio jumlah anggaran terhadap jumlah desa	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa/kelurahan. Makin tinggi rasio ini berarti makin besar alokasi belanja publik per desa/kelurahan, yang berarti makin tinggi komitmen PEMDA terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kinerja kecamatan dianggap makin baik.
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasio jumlah anggaran terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA untuk pengembangan wilayah Makin tinggi rasio ini berarti makin besar alokasi belanja publik per luas wilayah. Dengan demikian, kinerja kecamatan dianggap makin baik.
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasio Anggaran terhadap jumlah kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran Makin rendah rasio ini, berarti makin sedikit anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap jenis kewenangan yang dimiliki atau makin efisien penyelenggaraan kewenangan, sehingga makin baik kinerja kecamatan.
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontribusi dana yang bersumber dari swadaya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang diterima kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan Camat dan perangkatnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sekaligus juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan yang bersangkutan. Makin tinggi rasio ini makin tinggi kemampuan camat dalam menggerakkan partisipasi, makin tinggi partisipasi masyarakat, dan makin baik kinerja kecamatan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alokasi sektoral dana APBD di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini untuk melihat pemerataan pembangunan antar sektor dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan kecamatan Makin merata dan makin sesuai dengan prioritas kecamatan, makin baik kinerja kecamatan.
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah dana yang bersumber dari program bantuan yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Makin tinggi jumlah dana bantuan, makin baik kinerja kecamatan.
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Perlengkapan (Asset) Kecamatan	Jumlah Asset Daerah dalam Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan yang dimiliki kecamatan dianggap sebagai Asset Tetap. Makin tinggi nilai rupiah perlengkapan yang dimiliki, berarti makin potensial kecamatan
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tersebut untuk berkembang, dan makin baik kinerja kecamatan.

	Rasio Asset Daerah yang dimiliki terhadap asset daerah yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan di kecamatan. Rasio ideal adalah 100%, artinya kondisi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan. Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin baik kinerja kecamatan.
	Rasio luas kantor kecamatan terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani setiap hari.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor kecamatan dalam menampung masyarakat yang akan dilayani Makin tinggi rasio ini makin nyaman layanan yang diterima masyarakat, sehingga makin baik kinerja kecamatan
	Rasio luas kantor kecamatan terhadap jumlah pegawai kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor kecamatan dalam mewadahi pegawai yang akan memberikan pelayanan. Makin tinggi rasio ini makin nyaman penyelenggaraan pelayanan, sehingga makin baik kinerja kecamatan
	Rasio luas kantor pemerintah lainnya yang ada di kecamatan terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani setiap hari	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor PEMDA yang ada di kecamatan dalam menampung masyarakat yang akan dilayani Makin tinggi rasio ini makin nyaman layanan yang diterima masyarakat, sehingga makin baik kinerja kecamatan
	Rasio luas kantor pemerintah lainnya yang ada di kecamatan terhadap jumlah pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor PEMDA yang ada di kecamatan dalam mewadahi pegawai yang akan memberikan pelayanan. Makin tinggi rasio ini makin nyaman penyelenggaraan pelayanan, sehingga makin baik kinerja kecamatan
6. Dokumentasi	Tingkat kelengkapan kebijakan Pengaturan Administrasi Kearsipan dan Tata Naskah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam menata dokumentasi yang ada di daerah termasuk di kecamatan. Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan.
	Tingkat keamanan dokumentasi tersimpan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Camat dalam mengamankan berbagai dokumen penting dari kerusakan fisik Makin tinggi tingkat keamanan, makin baik kinerja kecamatan
	Tingkat Kemudahan dan Kecepatan penelusuran kembali dokumen tersimpan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam menata kearsipan dan

	<ul style="list-style-type: none"> dokumentasi agar mudah dan cepat dalam proses pengambilan keputusan Makin tinggi tingkat kemudahan dan kecepatan penelusuran kembali dokumen, makin baik kinerja kecamatan
Tingkat keterjaminan kerahasiaan dokumen penting	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam menjaga kerahasiaan dokumen penting Makin tinggi tingkat keterjaminan kerahasiaan dokumen yang semestinya dirahasiakan, makin baik kinerja kecamatan.
Tingkat pemanfaatan teknologi komputer untuk kearsipan dan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan modernisasi dokumentasi dan kearsipan agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat Makin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi komputer, makin baik kinerja kecamatan.
Rasio jumlah komputer terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ini menunjukkan tingkat pemanfaatan komputer sebagai media untuk pendokumentasian dan pemberian layanan kepada masyarakat Makin tinggi rasio ini, makin besar potensi pendokumentasian dan pelayanan dengan baik, sehingga kinerja kecamatan makin baik.
Jumlah dan jenis media publikasi yang dimiliki oleh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Makin banyak media yang digunakan makin baik kinerja kecamatan

2. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan merupakan aspek kedua yang diukur dan dinilai. Pelayanan dibagi ke dalam 2 kategori yaitu: Pertama, pelayanan yang diberikan oleh Camat (Kantor Kecamatan) yang bersifat pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif. Kedua, pelayanan dasar yang ada di Kecamatan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan yang Dilakukan Kecamatan

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Pelaksanaan layanan langsung kepada masyarakat	Jumlah pelayanan langsung kepada masyarakat yang diberikan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan kemampuan kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Makin banyak jumlah layanan langsung yang diberikan, makin baik kinerja kecamatan

Rasio jumlah layanan langsung kecamatan terhadap jumlah pegawai kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan produktivitas pegawai kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Jumlah layana KTP per tahun (pembuatan baru, mutasi, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini hanya digunakan untuk analisis kualitatif, sebagai alat kontrol pengendalian penduduk
Rata-rata lamanya pembuatan KTP	<ul style="list-style-type: none"> Makin cepat pembuatan KTP, makin baik kinerja kecamatan
Keberadaan Keputusan Camat yang bersifat mengatur masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jika ada, maka kinerja kecamatan baik. Sebaliknya jika tidak ada
Rasio jumlah layanan langsung kecamatan terhadap belanja aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan produktivitas modal kerja yang dimiliki kecamatan dalam menghasilkan layanan masyarakat Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah layanan langsung kecamatan terhadap asset kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan produktivitas modal tetap yang dimiliki kecamatan Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah layanan langsung PEMDA yang ada di kecamatan terhadap jumlah pegawai PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan produktivitas pegawai PEMDA yang ada di kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah layanan langsung PEMDA di kecamatan terhadap belanja aparatur PEMDA di kecamatan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan produktivitas modal kerja yang dimiliki PEMDA yang ada di Kecamatan dalam menghasilkan layanan masyarakat Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah layanan langsung PEMDA di kecamatan terhadap asset PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan produktivitas modal tetap yang dimiliki PEMDA di Kecamatan kecamatan dalam menghasilkan layanan kepada masyarakat Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
Jumlah layanan kecamatan yang bersifat menghubungkan masyarakat dengan layanan instansi teknis (Camat bertindak sebagai mediator), misalnya pengumpulan PBB, pengumpulan pajak daerah tertentu, dll.	<ul style="list-style-type: none"> Makin banyak jumlah layanan ini, makin kreatif kecamatan, dan makin baik kinerja kecamatan

2. Fasilitas	Frekuensi pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi teknis dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitas kepada instansi teknis. Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan
	Frekuensi pemberian fasilitas kepada organisasi atau perusahaan swasta dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitas kepada organisasi atau perusahaan swasta. Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan
	Frekuensi pemberian fasilitas kepada desa/kelurahan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitas kepada desa/kelurahan. Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan
	Frekuensi pemberian fasilitas kepada kelembagaan ekstrastruktural (RT/RW/PKK dll) dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitas kepada kelembagaan ekstrastruktural. Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan
	Frekuensi pemberian fasilitas kepada kecamatan lain dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitas kepada kecamatan lain. Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan
3. Koordinasi	Frekuensi rapat dan pertemuan koordinasi dengan instansi teknis dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen camat dalam upaya menyerasikan dan menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan instansi teknis di kecamatan. Makin tinggi angka ini, maka makin baik kinerja kecamatan.
	Frekuensi rapat atau pertemuan koordinasi dengan desa/kelurahan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen camat dalam upaya menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan. Makin tinggi angka ini, maka makin baik kinerja kecamatan.
	Frekuensi konsultasi Camat dengan instansi teknis di Daerah dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen camat dalam upaya menyerasikan dan menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan instansi teknis di kecamatan. Makin tinggi angka ini, maka makin baik kinerja kecamatan.
4. Pembinaan	Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap instansi teknis yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap instansi teknis di kecamatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan • Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap organisasi ekstrastruktural di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi ekstrastruktural • Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap organisasi lain (LSM dan swasta) yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi lain di kecamatan • Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap instansi teknis yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap instansi teknis di kecamatan • Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap desa dan kelurahan • Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap organisasi ekstrastruktural di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi ekstrastruktural • Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan
Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap organisasi lain (LSM dan swasta) yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi lain di kecamatan • Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan Dasar di Kecamatan

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Bidang pendidikan	Rasio jumlah usia SD terhadap jumlah SD	• Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah usia SD terhadap jumlah guru SD	• Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan

	Rasio jumlah usia SLTP terhadap jumlah SLTP	Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah usia SLTP terhadap jumlah guru SLTP	Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah usia SLTA terhadap jumlah SLTA	Makin tinggi rendah ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah usia SLTA terhadap jumlah guru SLTA	Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah siswa penerima beasiswa dari terhadap keseluruhan jumlah siswa	Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan Asumsi, keberadaan beasiswa menunjukkan adanya jaminan pendidikan bagi penduduk yang kurang/tidak mampu.
2. Bidang Kesehatan	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah PUSKESMAS, Poliklinik, dan RS.	Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah Dokter	Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio penduduk yang mempunyai Kartu Sehat terhadap keseluruhan penduduk	Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
3. Bidang Keamanan dan lainnya	Rasio jumlah pelanggan telepon terhadap jumlah penduduk	Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan.
	Rasio jumlah pelanggan listrik terhadap jumlah penduduk	Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
	Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
	Rasio jumlah polisi terhadap jumlah penduduk	Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan
	Keberadaan Kantor Pos	Jika ada, berarti kinerja kecamatan baik, sebaliknya jika tidak ada
	Keberadaan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)	Jika ada, berarti kinerja kecamatan baik, sebaliknya jika tidak ada
	Keberadaan sistem pengelolaan kebersihan lingkungan (sampah, limbah, penghijauan, dll)	Jika ada, berarti kinerja kecamatan baik, sebaliknya jika tidak ada
	Pengelolaan sumber daya produktif yang ada di kecamatan	Jika dikelola dengan baik, maka kinerja kecamatan baik. Sebaliknya jika tidak dikelola

3. Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)

Aspek outcomes atau indikator makro pembangunan merupakan aspek ketiga yang diukur dan dinilai. Ada 6 (enam) bidang indikator yang ditetapkan untuk aspek ini, yaitu indikator bidang ekonomi, indikator bidang social, indikator bidang budaya, indikator bidang politik, indikator bidang pemerintahan, dan indikator gabungan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.4

Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)

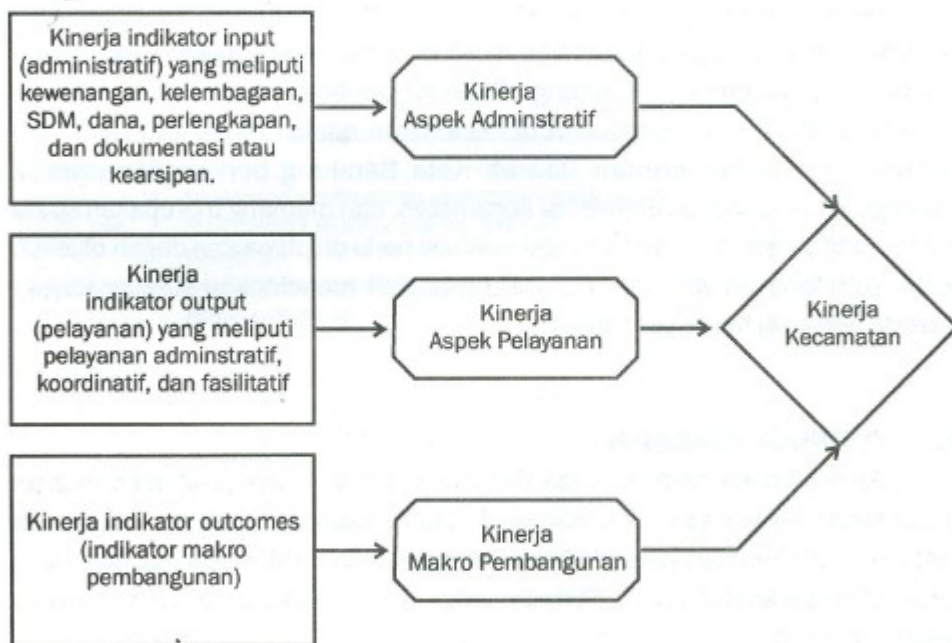
INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Indikator Bidang Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	• Makin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, makin baik kinerja kecamatan
	Pendapatan perkapita masyarakat	• Makin tinggi pendapatan perkapita masyarakat, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah Penduduk Miskin	• Makin sedikit jumlah penduduk miskin, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah desa miskin	• Makin sedikit jumlah desa miskin, makin baik kinerja kecamatan
2. Indikator Bidang Sosial	Tingkat pengangguran	• Makin kecil tingkat pengangguran, makin baik kinerja kecamatan
	Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk	• Makin kecil tingkat pertumbuhan penduduk, makin baik kinerja kecamatan.
	Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan/Profesi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dan terdaftar.	• Makin banyak jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan/Profesi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dan terdaftar, makin baik kinerja kecamatan
	Angka Partisipasi Pendidikan (APP) Sekolah Dasar	• Makin tinggi APP Dasar, makin baik kinerja kecamatan
	APP Sekolah Lanjutan Pertama	• Makin tinggi APP Lanjutan Tingkat Pertama, makin baik kinerja kecamatan
	APP Sekolah Lanjutan Atas	• Makin tinggi APP Lanjutan Tingkat Atas, makin baik kinerja kecamatan
	Angka Kematian Bayi saat dilahirkan	• Makin rendah Angka Kematian Bayi, makin baik kinerja kecamatan
	Angka Melek Huruf	• Makin tinggi Angka Melek Huruf, makin baik kinerja kecamatan
	Angka Harapan Hidup	• Makin tinggi Angka Harapan Hidup, makin baik kinerja kecamatan

3. Indikator Bidang Budaya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang kebudayaan	Makin banyak jumlah Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang budaya, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah atraksi seni dan budaya	Makin banyak jumlah atraksi seni dan budaya, makin baik kinerja kecamatan
	Frekuensi atraksi seni dan budaya	Makin banyak frekuensi atraksi seni dan budaya, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah sanggar seni dan budaya	Makin banyak sanggar seni dan budaya, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah budayawan dan seniman	Makin banyak budayawan dan seniman, makin baik kinerja kecamatan
4. Indikator Bidang Politik	Rasio penduduk memilih terhadap keseluruhan penduduk yang punya hak pilih pada PEMILU	Makin tinggi rasio penduduk yang ikut memilih terhadap keseluruhan penduduk yang punya hak pilih, makin baik kinerja kecamatan
	Jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Politik	Makin banyak jumlah DP Kecamatan Parpol, makin tinggi tingkat demokratisasi, dan makin baik kinerja kecamatan.
5. Indikator Bidang Pemerintahan (Kontribusi Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan)	Nilai pajak daerah yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan	Makin tinggi nilai pajak daerah yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan.
	Rasio antara realisasi pajak daerah terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan	Makin tinggi rasio antara realisasi pajak daerah terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan
	Nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan	Makin tinggi Nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan
	Rasio antara realisasi PBB terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan	Makin tinggi rasio antara realisasi PBB terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan.
6. Indikator Gabungan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Makin tinggi IPM, makin baik kinerja kecamatan.

BAB IV METODE EVALUASI

A. KONSTRUKSI INDEKS KINERJA KECAMATAN

Kinerja kecamatan merupakan totalitas kinerja kecamatan dan kinerja seluruh tingkatan pemerintahan (Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat) yang berlokasi di kecamatan tertentu. Dengan demikian, baik buruknya kinerja kecamatan bukan hanya ditentukan oleh kinerja Pemerintah Kecamatan saja, melainkan kinerja seluruh tingkatan Pemerintahan. Berikut ini konstruksi kinerja kecamatan yang dibangun atas indikator-indikatornya:



Gambar 4.1
Konstruksi Penetapan Capaian Kinerja Kecamatan

Sebagaimana nampak pada Gambar 4.1, bahwa kinerja Kecamatan dikonstruksi oleh tiga aspek penting yaitu aspek administratif, aspek pelayanan, dan kinerja makro pembangunan. Kinerja Aspek Adminsitraif dikonstruksi oleh 6 kelompok indikator utama yaitu kewenangan, kelembagaan, SDM, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi atau kearsipan. Kinerja Aspek Pelayanan dikonstruksi oleh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan dan

berbagai instansi yang ada di Kecamatan berupa pelayanan administratif, fasilitatif, koordinatif, dan substansif. Sementara itu kinerja Makro Pembangunan dikonstruksi oleh berbagai indikator makro pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual, peningkatan kapasitas organisasi tidak akan berhasil jika hanya menyentuh sumber daya manajemen yang meliputi personil, kelembagaan, kewenangan, SDM, dana, dan lain-lain. Keberhasilan peningkatan kapasitas organisasi juga ditentukan oleh perbaikan dalam proses manajemen. Dalam kaitan ini, evaluasi merupakan bagian dari rangkana proses manajemen yang sering terabaikan objektivitasnya, yang disebabkan oleh tidak adanya standar penilaian yang dapat dijadikan acuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas organisasi kecamatan perlu menyentuh berbagai aspek termasuk proses manajemen. Bagian dari proses manajemen yang kurang mendapat perhatian pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan adalah fungsi evaluasi. Oleh karena itu, jika Pemerintah Daerah Kota Bandung berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kecamatan, dan memang merupakan suatu niatan yang sangat baik, maka fungsi evaluasi perlu dioptimalkan dengan objektif. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menetapkan standar kinerja beserta berbagai faktor yang terkait.

B. FORMULA PENILAIAN

Sebagaimana nampak pada Gambar 4.1 ada 4 nilai yang akan muncul untuk setiap kecamatan, yaitu Indeks Kinerja Administratif (IKA), Indeks Kinerja Pelayanan (IKP), Indeks Kinerja Makro Pembangunan (IKMP), dan Indeks Kinerja Kecamatan secara total (IKK). Formula untuk setiap indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Indeks Kinerja Administratif (IKA) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja kecamatan dalam aspek administratif (kewenangan, kelembagaan, SDM, Dana, perlengkapan dan dokumentasi atau kearsipan). Indeks ini lebih menggambarkan kemampuan dan kemauan daerah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan fungsi kecamatan.

$$IKA = \frac{X_{si} - X_{a, \min}}{X_{a, \max} - X_{a, \min}} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{a,i}$ = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek administratif
 $X_{a, \min}$ = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek administratif
 $X_{a, \max}$ = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek administratif

Catatan:

- Perhitungan Indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penentuan $X_{a,\min}$ dan $X_{a,\max}$ dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

2. Indeks Kinerja Pelayanan (IKP) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan yang meliputi pelayanan administratif, fasilitatif, dan koordinatif. Indeks ini lebih menggambarkan kemampuan dan kemauan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

$$IKP = \frac{X_{p,i} - X_{p,\min}}{X_{p,\max} - X_{p,\min}} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{p,i}$ = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek pelayanan
 $X_{p, \min}$ = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek pelayanan
 $X_{p, \max}$ = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek pelayanan

Catatan:

- Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penilaian $X_{p,\min}$ dan $X_{p,\max}$ dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

3. Indeks Kinerja Makro Pembangunan (IKMP) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja indikator makro pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Angka partisipasi Sekolah, Income Percapita, dan lain-lain. Indeks ini lebih menggambarkan interaksi antara kemampuan dan kemauan Kecamatan dengan kemampuan dan kemauan Kabupaten, Propinsi, dan Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kecamatan.

$$IKMP = \frac{X_{m,i} - X_{m,\min}}{X_{m,\max} - X_{m,\min}} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{m,i}$ = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek indikator Makro pembangunan
 $X_{m, \min}$ = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek indikator makro pembangunan

$X_{m, \max}$ = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek indikator makro pembangunan

Catatan:

- Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penilaian $X_{m, \min}$ dan $X_{m, \max}$ dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

4. Indeks Kinerja Kecamatan (IKK) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja Kecamatan baik dalam aspek administratif, pelayanan, maupun indikator makro pembangunan. Indeks ini menunjukkan kinerja semua tingkatan pemerintahan (Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat) termasuk Kecamatan Sendiri sebagai SKPD yang mempunyai batasan wilayah kerja, dalam melakukan pembangunan di kecamatan. Untuk menentukan besarnya IKK ini dianggap bahwa setiap aspek (administratif, pelayanan, dan indikator makro pembangunan) mempunyai bobot yang berbeda-beda dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja kecamatan. Selain itu, digunakan indikator kualitatif yang dianggap sangat potensial bagi perkembangan kinerja kecamatan pada masa yang akan datang. Ada 5 aspek kualitatif yang menjadi pertimbangan yaitu:

- Keberadaan kelembagaan kecamatan atau desa/kelurahan yang dibentuk untuk tujuan pengembangan potensi kecamatan atau desa/kelurahan yang dimiliki;
- Partisipasi/inisiatif masyarakat dalam pembentukan kelembagaan tersebut;
- Pemanfaatan teknologi khususnya teknologi computer;
- Keberadaan media untuk melakukan publikasi kepada masyarakat;
- Keberadaan keputusan camat yang bersifat pengaturan terhadap masyarakat;

Formula yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$IKK = ((IKA \times b_1) + (IKP \times b_2) + (IKMP \times b_3)) \times \text{indikator kualitatif}$$

Keterangan:

b_1 , b_2 , dan b_3 adalah bobot kepentingan masing masing aspek (administrative, pelayanan, dan indikator makro pembangunan) dalam mengkonstruksi IKK. Besarnya bobot masing-masing aspek ini ditentukan berdasarkan pertimbangan para ahli di bidangnya (*expert judgement*).

Indeks suatu kecamatan, baik indeks parsial (per aspek) ataupun indeks total (keseluruhan) akan terletak pada interval 0 sampai dengan 100. Indeks 0 tidak berarti bahwa kinerja kecamatan sama dengan 0, tetapi kinerja kecamatan yang bersangkutan paling rendah diantara kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya (Bakorwil). Demikian juga indeks 100, bukan berarti kecamatan tersebut telah mempunyai kinerja optimal, melainkan kinerja tertinggi diantara kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah (Bakorwil) yang bersangkutan.

BAB V

HASIL PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

- A. INDEKS KINERJA ADMINISTRATIF (IKA)
 B. INDEKS KINERJA PELAYANAN (IKP)
 C. INDEKS KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN (IKMP)

1. Wilayah Bogor

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
1	Kab. Bogor	Kec. Babakan Madang	41,48	33,77	28,21
2	Kab. Bogor	Kec. Rumpin	26,64	5,17	0
3	Kab. Bogor	Kec. Sukamakmur	30,52	29,84	28,31
4	Kab. Bogor	Kec. Dramaga	66,36	36,90	16,89
5	Kab. Bogor	Kec. Rancabungur	35,91	41,48	32,21
6	Kab. Bogor	Kec. Nanggung	36,47	43,81	57,35
7	Kab. Bogor	Kec. Cigudeg	27,73	38,47	32,95
8	Kab. Bogor	Kec. Ciawi	47,05	32,84	31,77
9	Kab. Bogor	Kec. Jonggol	43,41	51,63	26,03
10	Kab. Bogor	Kec. Ciseeng	35,69	44,82	53,23
11	Kab. Bogor	Kec. Citeureup	38,09	77,08	41,80
12	Kab. Bogor	Kec. Tanjuralang	27,57	40,70	38,27
13	Kab. Bogor	Kec. Leuwiliang	32,62	45,56	42,69
14	Kab. Bogor	Kec. Tanjungsari	33,26	26,88	47,66
15	Kab. Bogor	Kec. Cijeruk	36,37	23,95	16,86
16	Kab. Bogor	Kec. Megamendung	41,32	74,91	100
17	Kab. Bogor	Kec. Caringin	42,67	31,75	13,45
18	Kab. Bogor	Kec. Tenjo	36,29	49,55	33,89
19	Kab. Bogor	Kec. Jasinga	36,84	48,06	15,18
20	Kab. Bogor	Kec. Tamansari	39,96	51,17	16,14
21	Kab. Bogor	Kec. Cibungbulang	44,51	84,79	30,53
22	Kab. Bogor	Kec. Cibinong	40,21	79,05	59,60
23	Kab. Bogor	Kec. Cogombong	28,02	38,14	43,04
24	Kab. Bogor	Kec. Kalapanunggal	38,28	38,73	41,98

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
25	Kab. Bogor	Kec. Leuwisadeng	29,39	59,51	21,21
26	Kab. Bogor	Kec. Bojonggede	30,89	56,69	32,39
27	Kab. Bogor	Kec. Kemang	49,49	39,13	26,48
28	Kab. Bogor	Kec. Sukaraja	30,73	61,65	52,11
29	Kab. Bogor	Kec. Gunungsindur	17,77	23,18	2,52
30	Kota Bogor	Kec. Bogor Selatan	50,81	60,94	54,17
31	Kota Bogor	Kec. Tanah Sareal	25,60	97,81	61,73
32	Kota Bogor	Kec. Bogor Utara	0	17,50	6,58
33	Kota Bogor	Kec. Bogor Timur	25,10	44,59	40,02
34	Kota Bogor	Kec. Bogor Barat	28,34	31,44	25,51
35	Kota Bogor	Kec. Bogor Tengah	27,92	64,74	63,46
36	Kota Sukabumi	Kec. Gunung Puyuh	24,94	76,82	46,70
37	Kota Sukabumi	Kec. Cikole	100	50,12	48,83
38	Kota Sukabumi	Kec. Citamiang	37,31	37,70	22,97
39	Kota Sukabumi	Kec. Warudoyong	27,41	35,53	54,71
40	Kota Sukabumi	Kec. Baros	32,26	35,62	35,20
41	Kota Sukabumi	Kec. Lembursitu	28,21	47,34	48,36
42	Kota Sukabumi	Kec. Cibeureum	35,52	54,95	16,89
43	Kab. Sukabumi	Kec. Tegalbuleud	34,68	61,17	54,98
44	Kab. Sukabumi	Kec. Simpenan	29,31	65,24	34,36
45	Kab. Sukabumi	Kec. Cikakak	33,30	67,45	14,68
46	Kab. Sukabumi	Kec. Curugkembar	24,92	37,19	38,05
47	Kab. Sukabumi	Kec. Cidahu	39,16	46,77	20,27
48	Kab. Sukabumi	Kec. Cikidang	26,78	69,76	28,16
49	Kab. Sukabumi	Kec. Pabuaran	37,75	40,93	27,29
50	Kab. Sukabumi	Kec. Kadudampit	53,50	100,00	37,58
51	Kab. Sukabumi	Kec. Gegerbitung	25,17	24,96	50,53
52	Kab. Sukabumi	Kec. Kalapanunggal	33,05	38,12	82,79
53	Kab. Sukabumi	Kec. Parungkuda	28,46	25,93	32,71
54	Kab. Sukabumi	Kec. Cisolok	24,01	88,74	40,54
55	Kab. Sukabumi	Kec. Cireunghas	17,78	47,59	24,23
56	Kab. Sukabumi	Kec. Parakansalak	35,50	35,03	38,37

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
57	Kab. Sukabumi	Kec. Ciemas	26,38	38,56	21,46
58	Kab. Sukabumi	Kec. Sukalarang	23,74	64,64	30,95
59	Kab. Sukabumi	Kec. Bojonggenteng	17,96	17,38	21,76
60	Kab. Sukabumi	Kec. Sukabumi	25,31	91,72	36,04
61	Kab. Sukabumi	Kec. Lengkong	29,64	43,58	39,13
62	Kab. Sukabumi	Kec. Jampangkulon	33,47	29,82	29,39
63	Kab. Sukabumi	Kec. Jampangtengah	25,59	33,91	21,78
64	Kab. Sukabumi	Kec. Nyalindung	31,51	43,54	38,34
65	Kab. Sukabumi	Kec. Palabuhanratu	27,85	74,41	38,34
66	Kab. Sukabumi	Kec. Cicantayan	22,77	15,07	27,27
67	Kab. Sukabumi	Kec. Kebonpedes	43,50	32,55	28,90
68	Kab. Sukabumi	Kec. Cibadak	40,03	41,79	58,54
69	Kab. Sukabumi	Kec. Cikembar	30,28	35,99	52,44
70	Kab. Sukabumi	Kec. Nagrak	41,05	17,27	26,16
71	Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	30,45	30,11	56,00
72	Kab. Sukabumi	Kec. Cibitung	29,40	32,61	20,87
73	Kab. Sukabumi	Kec. Sukaraja	40,48	37,44	37,75
74	Kab. Sukabumi	Kec. Kabandungan	24,05	84,60	23,80
75	Kab. Sukabumi	Kec. Gunungguruh	22,76	42,93	4,33
76	Kab. Sukabumi	Kec. Waluran	30,32	33,77	46,21
77	Kab. Sukabumi	Kec. Purabaya	29,11	35,36	33,87
78	Kab. Sukabumi	Kec. Surade	29,78	28,64	74,71
79	Kab. Sukabumi	Kec. Caringin	39,69	50,07	15,20
80	Kab. Sukabumi	Kec. Warungkiara	25,66	25,22	43,65
81	Kab. Sukabumi	Kec. Cidadak	31,58	60,41	50,66
82	Kab. Sukabumi	Kec. Cantargadung	22,29	30,33	11,08
83	Kab. Sukabumi	Kec. Cicurug	35,60	44,55	47,44
84	Kab. Sukabumi	Kec. Ciracap	33,72	35,74	24,10
85	Kab. Sukabumi	Kec. Cidolog	35,79	61,95	44,45
86	Kab. Sukabumi	Kec. Sagaranten	22,59	81,40	82,92
87	Kab. Sukabumi	Kec. Kalibunder	33,16	33,47	22,13
88	Kota Depok	Kec. Beji	32,45	29,82	31,82

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
89	Kota Depok	Kec. Sawangan	35,41	79,89	7,64
90	Kota Depok	Kec. Cimanggis	25,37	35,60	23,41
91	Kota Depok	Kec. Limo	41,02	77,39	28,31
92	Kota Depok	Kec. Pancoran mas	13,59	15,30	5,04
93	Kota Depok	Kec. Sukmajaya	26,12	39,99	80,89
94	Kab. Cianjur	Kec. Cipanas	24,41	33,77	23,68
95	Kab. Cianjur	Kec. Cilaku	24,71	27,09	40,99
96	Kab. Cianjur	Kec. Cibinong	28,84	33,98	18,91
97	Kab. Cianjur	Kec. Warung Kondang	30,24	32,30	15,70
98	Kab. Cianjur	Kec. Pacet	75,78	45,68	29,39
99	Kab. Cianjur	Kec. Cugenang	15,42	35,34	24,99
100	Kab. Cianjur	Kec. Cidaun	1,21	0	2,40

2. Wilayah Cirebon

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
1	Kota Cirebon	Kec. Lemahwungkuk	25,21	39,01	30,30
2	Kota Cirebon	Kec. Pekalipan	57,58	29,44	96,34
3	Kota Cirebon	Kec. Harjamukti	27,71	33,51	27,66
4	Kota Cirebon	Kec. Kesambi	35,79	35,94	11,47
5	Kab. Cirebon	Kec Weru	17,72	4,06	45,53
6	Kab. Cirebon	Kec.Klangenan	41,29	28,85	55,00
7	Kab. Cirebon	Kec.Cirebon Utara	15,57	18,40	38,63
8	Kab. Cirebon	Kec.Pabuaran	47,57	62,40	37,23
9	Kab. Cirebon	Kec.Beber	25,01	22,62	38,35
10	Kab. Cirebon	Kec.Pabedilan	34,39	16,90	34,10
11	Kab. Cirebon	Kec.Karangwareng	28,93	40,68	22,73
12	Kab. Cirebon	Kec.Ciwaringin	32,04	54,11	39,62
13	Kab. Cirebon	Kec.Panguragan	27,12	19,07	21,53
14	Kab. Cirebon	Kec.Gebang	38,31	4,84	49,09
15	Kab. Cirebon	Kec.Susukan	55,85	100	86,00
16	Kab. Cirebon	Kec Waled	25,44	52,04	13,97

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
17	Kab. Cirebon	Kec. Karangsembung	24,83	44,39	30,75
18	Kab. Cirebon	Kec. Babakan	63,17	36,67	38,00
19	Kab. Cirebon	Kec. Kapetakan	0	9,40	50,18
20	Kab. Cirebon	Kec. Palimanan	56,41	14,18	12,56
21	Kab. Cirebon	Kec. Kedawung	29,29	19,36	33,08
22	Kab. Cirebon	Kec. Losari	70,61	11,37	33,78
23	Kab. Cirebon	Kec. Astanajapura	38,85	12,36	24,45
24	Kab. Cirebon	Kec. Ciledug	65,38	12,94	21,01
25	Kab. Cirebon	Kec. Kaliwedi	12,11	17,29	21,15
26	Kab. Cirebon	Kec. Pangenan	25,75	47,44	34,66
27	Kab. Cirebon	Kec. Dukupuntang	30,89	21,42	12,91
28	Kab. Cirebon	Kec. Susukanlebak	15,65	2,04	22,70
29	Kab. Kuningan	Kec. Kuningan	34,74	38,55	31,35
30	Kab. Kuningan	Kec. Kadugede	55,21	15,72	52,29
31	Kab. Kuningan	Kec. Karangancana	35,41	36,10	35,82
32	Kab. Kuningan	Kec. Luragung	59,95	19,18	41,70
33	Kab. Kuningan	Kec. Subang	56,95	46,27	71,92
34	Kab. Kuningan	Kec. Cilimus	44,99	8,98	57,21
35	Kab. Kuningan	Kec. Cimahi	43,87	3,02	51,62
36	Kab. Kuningan	Kec. Mandirancan	60,16	31,94	42,47
37	Kab. Kuningan	Kec. Pancalang	37,09	11,97	16,40
38	Kab. Kuningan	Kec. Cigugur	71,32	24,92	40,18
39	Kab. Kuningan	Kec. Selajambe	56,97	15,80	57,64
40	Kab. Kuningan	Kec. Darma	87,56	15,92	60,52
41	Kab. Kuningan	Kec. Cibingbin	31,40	55,41	43,95
42	Kab. Kuningan	Kec. Cidahu	29,70	4,46	18,19
43	Kab. Kuningan	Kec. Nusaherang	82,87	8,70	82,48
44	Kab. Kuningan	Kec. Cibeureum	23,83	7,19	47,04
45	Kab. Kuningan	Kec. Ciawigebang	40,12	4,90	29,06
46	Kab. Kuningan	Kec. Cipicung	19,40	1,27	36,66
47	Kab. Kuningan	Kec. Ciwaru	39,64	25,28	72,55
48	Kab. Kuningan	Kec. Maleber	29,14	0	41,24

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
49	Kab. Kuningan	Kec. Ciniru	39,15	33,77	75,97
50	Kab. Kuningan	Kec. Kalimanggis	22,23	15,57	0
51	Kab. Kuningan	Kec. Cilebak	34,41	4,84	35,57
52	Kab. Kuningan	Kec. Jalaksana	58,02	42,84	77,09
53	Kab. Kuningan	Kec. Garawangi	57,63	20,53	66,64
54	Kab. Kuningan	Kec. Lebak Wangi	49,43	26,23	25,48
55	Kab. Kuningan	Kec. Japara	37,52	29,97	91,77
56	Kab. Kuningan	Kec. Hantara	19,53	32,17	35,86
57	Kab. Kuningan	Kec. Cigandamekar	31,00	29,67	46,94
58	Kab. Kuningan	Kec. Sindang Agung	30,61	41,64	46,80
59	Kab. Kuningan	Kec. Pasawahan	66,40	12,29	45,99
60	Kab. Kuningan	Kec. Kramatmulya	33,44	19,30	55,52
61	Kab. Majalengka	Kec. Dawuan	33,55	12,39	29,35
62	Kab. Majalengka	Kec. Palasah	38,85	3,48	30,54
63	Kab. Majalengka	Kec. Bantarujeg	43,16	5,60	19,67
64	Kab. Majalengka	Kec. Sindangwangi	48,10	18,95	41,59
65	Kab. Majalengka	Kec. Kadipaten	58,73	17,54	30,40
66	Kab. Majalengka	Kec. Leuwimunding	53,30	20,54	43,46
67	Kab. Majalengka	Kec. Majalengka	100	8,70	31,70
68	Kab. Majalengka	Kec. Cigasong	42,11	22,46	43,60
69	Kab. Majalengka	Kec. Lemahsugih	17,03	22,26	53,69
70	Kab. Majalengka	Kec. Banjaran	92,66	31,81	47,64
71	Kab. Majalengka	Kec. Cingambul	25,44	33,50	18,61
72	Kab. Majalengka	Kec. Sukahaji	19,22	30,59	100
73	Kab. Majalengka	Kec. Kertajati	62,94	10,11	7,60
74	Kab. Majalengka	Kec. Rajagaluh	55,93	24,63	35,75
75	Kab. Majalengka	Kec. Jatitujuh	58,20	10,15	47,11
76	Kab. Majalengka	Kec. Maja	61,18	30,38	76,18
77	Kab. Majalengka	Kec. Argapura	26,03	11,31	10,10
78	Kab. Majalengka	Kec. Talaga	36,99	14,88	43,74
79	Kab. Indramayu	Kec. Sukagumiwang	12,69	38,31	27,80
80	Kab. Indramayu	Kec. Kandanghaur	46,75	13,42	24,03

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
81	Kab. Indramayu	Kec. Karangampel	50,45	16,19	39,27
82	Kab. Indramayu	Kec. Bongas	33,09	10,99	30,61
83	Kab. Indramayu	Kec. Haurgeulis	57,28	36,73	44,58
84	Kab. Indramayu	Kec. Sukra	41,32	26,51	74,95
85	Kab. Indramayu	Kec. Widasari	35,30	9,88	40,71
86	Kab. Indramayu	Kec. Bangodua	53,12	29,87	42,51
87	Kab. Indramayu	Kec. Anjatan	55,49	32,43	47,47
88	Kab. Indramayu	Kec. Krangkeng	9,92	11,82	24,60

3. Wilayah Priangan

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
1	Kota Banjar	Kec. Purwaharja	37,95	34,74	35,43
2	Kota Banjar	Kec. Pataruman	43,41	28,21	32,12
3	Kota Banjar	Kec. Banjar	26,22	18,11	34,38
4	Kota Banjar	Kec. Langensari	23,48	6,31	20,55
5	Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	42,37	22,94	23,19
6	Kota Tasikmalaya	Kec. Cihideung	21,67	27,85	56,95
7	Kota Tasikmalaya	Kec. Indihiang	22,83	33,86	18,22
8	Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang	40,44	56,92	16,50
9	Kota Tasikmalaya	Kec. Tamansari	36,40	25,08	12,51
10	Kota Tasikmalaya	Kec. Cibeureum	29,74	15,41	12,76
11	Kota Tasikmalaya	Kec. Kawalu	24,54	29,14	17,19
12	Kota Tasikmalaya	Kec. Mangkubumi	11,08	27,47	0
13	Kota Bandung	Kec. Cidadap	45,71	63,99	49,69
14	Kota Bandung	Kec. Coblong	35,09	47,78	31,76
15	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kaler	47,29	30,28	22,77
16	Kota Bandung	Kec. Andir	25,83	28,56	43,35
17	Kota Bandung	Kec. Cicendo	37,18	63,41	42,42
18	Kota Bandung	Kec. Babakan Ciparay	24,63	13,05	27,18
19	Kota Bandung	Kec. Cibeunying Kaler	62,62	47,73	22,56
20	Kota Bandung	Kec. Sukasari	38,66	85,19	19,65

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
21	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kidul	43,65	24,28	27,18
22	Kota Bandung	Kec. Bandung Kulon	32,34	15,86	7,58
23	Kota Bandung	Kec. Batununggal	32,06	22,92	22,40
24	Kota Bandung	Kec. Regol	43,27	57,11	20,34
25	Kota Bandung	Kec. Ujungberung	43,18	20,17	46,49
26	Kota Bandung	Kec. Arcamanik	30,99	12,25	38,92
27	Kota Bandung	Kec. Rancasari	51,11	33,50	36,67
28	Kota Bandung	Kec. Bandung Kidul	24,64	9,33	36,12
29	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Tengah	43,03	55,50	45,19
30	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Selatan	28,14	16,70	36,10
31	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Utara	41,73	30,77	18,85
32	Kab. Bandung	Kec. Cileunyi	27,76	15,69	2,69
33	Kab. Bandung	Kec. Cimenyan	44,27	20,28	18,35
34	Kab. Bandung	Kec. Cilengkrang	50,07	23,93	31,55
35	Kab. Bandung	Kec. Margahayu	30,20	100	59,07
36	Kab. Bandung	Kec. Margaasih	49,78	24,29	31,05
37	Kab. Bandung	Kec. Cipatat	36,08	20,06	17,69
38	Kab. Bandung	Kec. Parongpong	43,93	37,95	33,40
39	Kab. Bandung	Kec. Ngamprah	27,61	16,54	37,70
40	Kab. Bandung	Kec. Ciparay	23,71	6,87	23,76
41	Kab. Bandung	Kec. Cipeundeuy	26,04	23,16	27,77
42	Kab. Bandung	Kec. Pacet	32,03	21,97	33,37
43	Kab. Bandung	Kec. Kertasari	25,98	12,17	10,29
44	Kab. Bandung	Kec. Baleendah	46,01	13,16	28,61
45	Kab. Bandung	Kec. Majalaya	15,42	37,40	17,78
46	Kab. Bandung	Kec. Solokanjeruk	20,99	16,10	21,56
47	Kab. Bandung	Kec. Rongga	27,35	11,21	15,16
48	Kab. Bandung	Kec. Pangalengan	49,96	18,88	23,28
49	Kab. Bandung	Kec. Banjaran	39,34	5,94	18,75
50	Kab. Bandung	Kec. Nagreg	32,15	33,07	27,71
51	Kab. Bandung	Kec. Cihampelas	32,13	32,55	44,04
52	Kab. Bandung	Kec. Pameungpeuk	35,89	33,70	36,59

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
53	Kab. Bandung	Kec. Arjasari	31,20	28,90	40,79
54	Kab. Bandung	Kec. Cikancung	30,38	18,94	3,25
55	Kab. Bandung	Kec. Rancaekek	39,55	23,52	32,75
56	Kab. Bandung	Kec. Pasirjambu	45,34	35,85	26,05
57	Kab. Bandung	Kec. Soreang	44,76	0	16,83
58	Kab. Bandung	Kec. Paseh	29,01	26,52	27,81
59	Kab. Bandung	Kec. Ciwidey	44,70	20,63	25,90
60	Kab. Bandung	Kec. Rancabali	30,35	47,25	31,72
61	Kab. Bandung	Kec. Lembang	44,69	19,79	11,34
62	Kab. Bandung	Kec. Cisarua	41,96	26,00	36,04
63	Kab. Bandung	Kec. Cangkuang	33,07	25,75	20,36
64	Kab. Bandung	Kec. Cimaung	39,53	17,66	20,47
65	Kab. Bandung	Kec. Cipongkor	24,82	66,49	45,13
66	Kab. Bandung	Kec. Katapang	33,16	13,99	31,70
67	Kab. Bandung	Kec. Padalarang	39,80	21,29	27,92
68	Kab. Bandung	Kec. Batujajar	100	19,21	19,52
69	Kab. Bandung	Kec. Cililin	34,91	35,00	28,30
70	Kab. Bandung	Kec. Dayeuh Kolot	40,72	32,72	23,45
71	Kab. Bandung	Kec. Sindangkerta	21,73	20,05	28,34
72	Kab. Tasikmalaya	Kec. Singaparna	37,14	27,29	30,27
73	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cipatujah	44,60	31,38	33,29
74	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cikalong	70,97	21,12	21,93
75	Kab. Tasikmalaya	Kec. Manonjaya	66,69	16,81	22,27
76	Kab. Tasikmalaya	Kec. Pancatengah	60,15	24,56	23,15
77	Kab. Tasikmalaya	Kec. Salopa	44,16	22,00	27,50
78	Kab. Tasikmalaya	Kec. Karangnunggal	48,79	28,10	35,70
79	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cikatomas	63,01	31,59	33,12
80	Kab. Tasikmalaya	Kec. Salawu	34,65	29,83	23,17
81	Kab. Tasikmalaya	Kec. Rajapolah	34,11	17,35	25,99
82	Kab. Tasikmalaya	Kec. Ciawi	61,88	61,67	34,78
83	Kab. Tasikmalaya	Kec. Taraju	48,98	20,62	47,69
84	Kab. Tasikmalaya	Kec. Parungponteng	36,19	29,83	26,78

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
85	Kab. Tasikmalaya	Kec. Bojonggambir	52,95	44,53	24,52
86	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cibalong	38,67	24,47	23,49
87	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukaraja	42,32	31,14	26,28
88	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sodong Hilir	28,61	14,87	53,09
89	Kab. Tasikmalaya	Kec. Pagerageung	59,68	25,92	20,97
90	Kab. Tasikmalaya	Kec. Gunungtanjung	78,81	13,69	27,18
91	Kab. Tasikmalaya	Kec. Tanjung jaya	58,45	23,65	23,19
92	Kab. Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	39,55	14,48	19,50
93	Kab. Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	59,26	38,12	32,51
94	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukaratu	25,44	58,33	33,29
95	Kab. Tasikmalaya	Kec. Culamega	44,48	46,33	16,21
96	Kab. Tasikmalaya	Kec. Kadipaten	37,54	29,33	18,32
97	Kab. Tasikmalaya	Kec. Bojongasih	28,77	19,40	29,62
98	Kab. Tasikmalaya	Kec. Leuwisari	35,95	27,07	21,64
99	Kab. Tasikmalaya	Kec. Puspahiang	32,03	16,15	23,72
100	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukarame	38,15	28,90	31,05
101	Kab. Tasikmalaya	Kec. Jamanis	31,88	29,27	32,54
102	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukaresik	23,56	37,90	30,63
103	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sariwangi	60,05	20,41	26,34
104	Kab. Tasikmalaya	Kec. Jatiwaras	41,12	16,10	11,02
105	Kab. Tasikmalaya	Kec. Padakembang	40,53	15,28	28,00
106	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukahening	36,14	17,05	16,77
107	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cineam	60,62	50,67	23,91
108	Kab. Tasikmalaya	Kec. Bantarkalong	42,13	25,10	22,71
109	Kab. Tasikmalaya	Kec. Karangjaya	59,02	38,50	30,46
110	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cisayong	74,08	21,40	30,25
111	Kab. Garut	Kec. Cisewu	52,99	30,32	32,03
112	Kab. Garut	Kec. Garut Kota	33,04	57,63	28,57
113	Kab. Garut	Kec. Cikajang	26,65	25,67	22,12
114	Kab. Garut	Kec. Cisurupan	32,75	24,75	21,07
115	Kab. Garut	Kec. Cilawu	30,63	13,56	21,10
116	Kab. Garut	Kec. Sukawening	33,78	58,34	42,21

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
117	Kab. Garut	Kec. Peundeuy	32,63	75,88	27,71
118	Kab. Garut	Kec. Bayongbong	30,07	29,12	21,26
119	Kab. Garut	Kec. Pamulihan	44,43	35,94	21,66
120	Kab. Garut	Kec. Singajaya	27,22	15,94	23,76
121	Kab. Garut	Kec. Banjarwangi	31,33	20,93	29,66
122	Kab. Garut	Kec. Malangbong	35,24	23,74	20,65
123	Kab. Garut	Kec Weru	11,20	9,36	38,08
124	Kab. Garut	Kec.Ciwaringin	18,27	14,68	50,61
125	Kab. Garut	Kec.Cirebon Utara	15,13	2,68	17,13
126	Kab. Garut	Kec.Pabuaran	16,87	54,08	25,88
127	Kab. Garut	Kec.Beber	19,16	12,33	24,14
128	Kab. Garut	Kec.Pabedilan	19,32	14,40	29,26
129	Kab. Garut	Kec.Kadungora	3,07	13,54	21,54
130	Kab. Garut	Kec.Leuwigoong	13,79	10,96	22,82
131	Kab. Garut	Kec.Cibatu	30,76	15,69	24,01
132	Kab. Garut	Kec.Samarang	26,39	20,08	17,67
133	Kab. Garut	Kec.Leles	0	20,66	34,95
134	Kab. Garut	KecTarogong Kaler	32,83	21,61	24,39
135	Kab. Garut	Kec Banyuresmi	17,33	16,67	17,74
136	Kab. Garut	Kec Wanaraja	9,86	22,04	20,42
137	Kab. Garut	Kec Karangpawitan	31,65	19,81	22,10
138	Kab. Garut	Kec. Talegong	37,65	18,80	31,34
139	Kab. Garut	Kec. Mekarmukti	33,26	52,14	26,34
140	Kab. Garut	Kec. Cigeduk	33,31	41,94	22,04
141	Kab. Garut	Kec. Caringin	25,71	24,89	25,36
142	Kab. Garut	Kec. Karangtengah	36,65	41,86	28,46
143	Kab. Garut	Kec. Kersamanah	31,44	24,23	19,92
144	Kab. Garut	Kec. Sukaresmi	27,90	57,02	26,62
145	Kab. Garut	Kec. Tarogong	32,71	29,88	26,53
146	Kab. Garut	Kec. Pangatikan	36,25	29,58	23,59
147	Kab. Garut	Kec. Sucinaraja	35,80	30,29	19,58
148	Kab. Garut	Kec. Cihurip	35,03	37,40	38,39

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
149	Kab. Garut	Kec. Pasir Wangi	22,16	13,50	25,48
150	Kab. Garut	Kec. Cibiuk	42,71	28,89	44,12
151	Kab. Garut	Kec. Selawi	25,06	11,74	30,86
152	Kab. Garut	Kec. Limbangan	35,46	28,15	29,93
153	Kab. Sumedang	Kec. Tanjung Medar	25,12	40,99	38,75
154	Kab. Sumedang	Kec. Pamulihan	40,17	33,86	16,31
155	Kab. Sumedang	Kec. Cisarua	39,01	28,67	19,82
156	Kab. Sumedang	Kec. Surian	70,69	81,69	38,39
157	Kab. Sumedang	Kec. Tanjung Sari	51,73	45,32	34,30
158	Kab. Sumedang	Kec. Ujung Jaya	24,39	26,06	33,94
159	Kab. Sumedang	Kec. Buahdua	40,51	24,36	100
160	Kab. Sumedang	Kec. Cimalaka	41,06	20,85	74,08
161	Kab. Sumedang	Kec. Jatinangor	32,33	20,74	20,09
162	Kab. Sumedang	Kec. Jatigede	47,49	41,14	24,39
163	Kab. Sumedang	Kec. ???????	38,00	32,50	36,17

4. Wilayah Purwakarta

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
	Kab. Karawang	Kec. Cibuaya	43,18	27,27	31,77
1	Kab. Karawang	Kec. Kutawaluya	58,24	10,05	32,69
2	Kab. Karawang	Kec. Batujaya	43,04	62,63	29,47
3	Kab. Karawang	Kec. Ciampel	65,95	27,53	79,21
4	Kab. Karawang	Kec. Rongasdengklok	25,86	5,89	6,55
5	Kab. Karawang	Kec. Pangkalan	46,94	27,02	35,38
6	Kab. Karawang	Kec. Telujambe Timur	62,90	53,24	70,13
7	Kab. Karawang	Kec. Cilamaya Kulon	52,45	2,01	60,73
8	Kab. Karawang	Kec. Banyusari	40,62	26,03	75,96
9	Kab. Karawang	Kec. Telagasari	71,72	24,82	81,16
10	Kab. Karawang	Kec. Tempuran	70,98	30,54	62,00
11	Kab. Karawang	Kec. Cilamaya Wetan	55,90	47,48	26,93
12	Kab. Karawang	Kec. Jatisari	44,56	19,08	44,78

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
13	Kab. Karawang	Kec. Pakisjaya	30,00	8,41	19,52
14	Kab. Karawang	Kec. Cikampek	50,44	24,29	82,55
15	Kab. Karawang	Kec. Telukjambe Barat	37,19	10,03	54,38
16	Kab. Karawang	Kec. Majalaya	49,84	0	21,42
17	Kab. Karawang	Kec. Cilebar	31,25	3,41	14,36
18	Kab. Karawang	Kec. Purwasari	45,39	21,19	69,14
19	Kab. Karawang	Kec. Kotabaru	57,60	27,04	47,68
20	Kab. Karawang	Kec. Karawang Timur	58,62	20,15	58,94
21	Kab. Karawang	Kec. Karawang Barat	64,93	13,55	23,80
22	Kab. Karawang	Kec. Tirtamulya	68,41	11,14	87,31
23	Kab. Karawang	Kec. Rawameta	58,79	37,26	62,28
24	Kab. Karawang	Kec. Lemahabang	49,82	8,96	43,16
25	Kab. Karawang	Kec. Jayakarta	65,68	34,19	76,68
26	Kab. Karawang	Kec. Tegalwaru	34,07	27,78	30,54
27	Kab. Karawang	Kec. Pedes	67,01	6,83	51,37
28	Kab. Purwakarta	Kec. Purwakarta	93,24	27,96	79,10
29	Kab. Purwakarta	Kec. Cibatu	59,85	12,01	26,54
30	Kab. Purwakarta	Kec. Bungursari	88,43	100	36,41
31	Kab. Purwakarta	Kec. Sukasari	68,92	16,26	45,38
32	Kab. Purwakarta	Kec. Pondoksalam	35,43	56,29	50,30
33	Kab. Purwakarta	Kec. Bojong	57,79	36,51	14,60
34	Kab. Purwakarta	Kec. Kiarapedes	52,24	13,04	13,33
35	Kab. Purwakarta	Kec. Pasawahan	72,00	59,58	9,72
36	Kab. Purwakarta	Kec. Tegalwaru	30,30	18,71	48,08
37	Kab. Purwakarta	Kec. Campaka	100	55,97	10,47
38	Kab. Purwakarta	Kec. Babakancikao	54,34	32,39	34,63
39	Kab. Purwakarta	Kec. Wanayasa	19,35	10,41	58,83
40	Kab. Purwakarta	Kec. Darangdan	59,98	22,30	65,49
41	Kab. Purwakarta	Kec. Sukatani	64,07	12,59	28,80
42	Kab. Purwakarta	Kec. Plered	43,86	77,72	40,46
43	Kab. Purwakarta	Kec. Maniis	36,95	19,06	22,69
44	Kab. Purwakarta	Kec. Jatiluhur	70,47	50,26	24,87

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	IKA	IKP	IKMP
45	Kab. Subang	Kec. Legankolon	40,11	17,65	25,03
46	Kab. Subang	Kec. Pagaden	46,03	2,41	73,70
47	Kab. Subang	Kec. Tanjungsang	56,73	43,75	48,95
48	Kab. Subang	Kec. Ciasem	63,68	49,68	52,44
49	Kab. Subang	Kec. Pamanukan	61,71	25,95	70,41
50	Kab. Subang	Kec. Comprang	66,00	57,30	73,07
51	Kab. Subang	kec. Patokbeusi	48,78	28,10	17,77
52	Kab. Subang	Kec. Cisalak	77,87	44,20	100
53	Kab. Subang	Kec. Sagalaherang	82,77	19,91	76,52
54	Kab. Subang	Kec. Pabuaran	0	10,97	44,31
55	Kab. Subang	Kec. Binong	54,36	21,43	25,23
56	Kab. Subang	Kec. Cipeundeuy	49,73	19,89	26,06
57	Kab. Subang	Kec. Pusakanagara	66,36	40,85	88,77
58	Kab. Subang	Kec. Cibogo	66,33	17,54	66,84
59	Kab. Subang	Kec. Purwadadi	58,85	17,43	51,96
60	Kab. Subang	Kec. Cipunagara	67,20	13,66	65,17
61	Kab. Subang	Kec. Cijambe	69,34	14,57	41,97
62	Kab. Subang	Kec. Cikaum	37,21	23,17	0
63	Kab. Subang	Kec. Kalijati	80,41	29,98	97,94
64	Kab. Subang	Kec. Blanakan	63,43	30,75	43,40

BAB VI

PERBANDINGAN KINERJA ANTAR KECAMATAN DAN ANTAR DAERAH

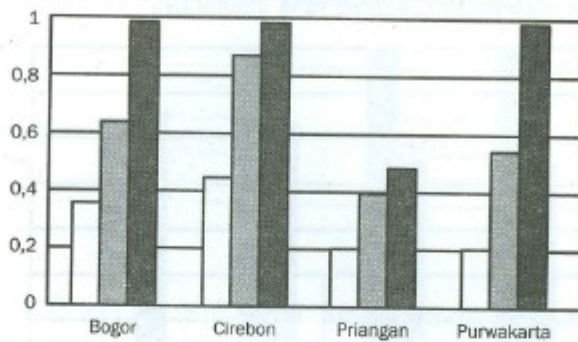
A. PERBANDINGAN KINERJA INDIKATOR ADMINISTRATIF UNTUK BEBERAPA KECAMATAN

Perbandingan ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa prestasi aspek administratif setiap kecamatan tidak sama. Sebagai contoh, *Grafik 6.1* menunjukkan bahwa Kecamatan Cikole, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Campaka, sudah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. Sementara itu, Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Babakan Cikao masih perlu kerja keras untuk dapat melaksanakan semua kewenangan yang diterimanya dari Bupati. Selanjutnya, untuk melihat perbandingan kinerja indikator administratif antar kecamatan, diambil beberapa indikator yang dianggap dapat mewakili. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat terhadap jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota;
2. Rasio jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Kab/Kota kepada Camat terhadap jumlah jabatan struktural yang ada
3. Rasio jumlah pegawai kecamatan (Sarjana) yang ada terhadap jumlah pegawai kecamatan (Sarjana) yang dibutuhkan
4. Rasio total anggaran kecamatan (Belanja Publik dan Belanja Aparatur) terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005

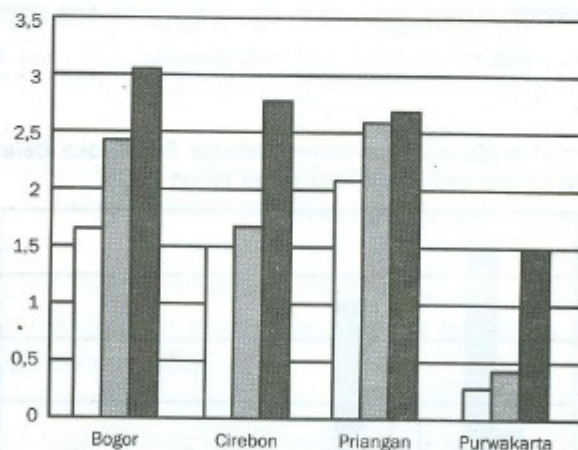
Perbandingan kinerja indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada grafik berikut (kecamatan yang dicetak tebal merupakan kecamatan dengan indeks kinerja terbaik):

Grafik 6.1. Rasio jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat terhadap jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota



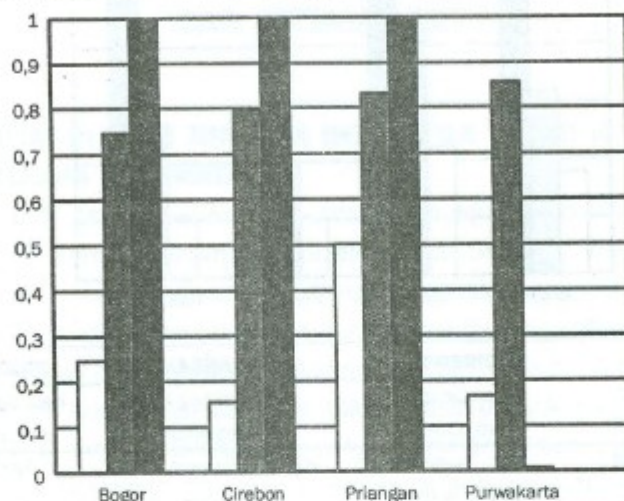
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Cibeureum	Kec. Gebang	Kec. Sodong Hilir	Kec. Babakancikao
Kota Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Tasikmalaya	Kab. Purwakarta
Kec. Kadudampit	Kec. Jalaksana	Kec. Cibeunying Kaler	Kec. Cisalak
Kab. Sukabumi	Kab. Kuningan	Kota Bandung	Kab. Subang
Kec. Cikole	Kec. Majalengka	Kec. Batujajar	Kec. Campaka
Kota Sukabumi	Kab. Majalengka	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.2. Rasio jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Kab/Kota kepada Camat terhadap jumlah jabatan struktural yang ada



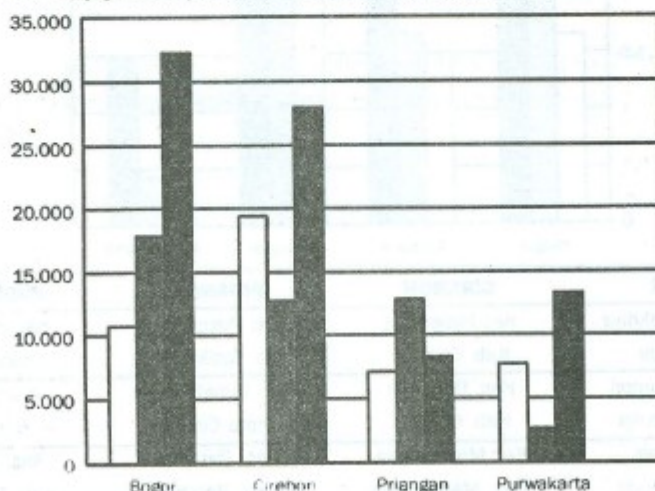
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Sukamakmur	Kec. Pabedilan	Kec. Puspahiang	Kec. Legonkulon
Kab. Bogor	Kab. Cirebon	Kab. Tasikmalaya	Kab. Subang
Kec. Kadudampit	Kec. Babakan	Kec. Cimahi Utara	Kec. Sukasari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kota Cimahi	Kab. Purwakarta
Kec. Cikole	Kec. Majalengka	Kec. Batujajar	Kec. Campaka
Kota Sukabumi	Kab. Majalengka	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.3. Rasio jumlah pegawai kecamatan (Sarjana) yang ada terhadap jumlah pegawai kecamatan (Sarjana) yang dibutuhkan



BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Cogombong	Kec. Pabedilan	Kec. Banjar	Kec. Jatisari
Kab. Bogor	Kab. Bogor	Kota Banjar	Kab. Karawang
Kec. Bogor Selatan	Kec. Haurgeulis	Kec. Karangjaya	Kec. Tirtamulya
Kota Bogor	Kab. Indramayu	Kab. Tasikmalaya	Kab. Karawang
Kec. Cikole	Kec. Majalengka	Kec. Batujajar	Kec. Campaka
Kota Sukabumi	Kab. Majalengka	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.4. Rasio total anggaran kecamatan (Belanja Publik dan Belanja Aparatur) terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005



BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Dramaga	Kec Weru	Kec. Cibiuk	Kec. Pabuaran
Kab. Bogor	Kab. Cirebon	Kab. Garut	Kab. Subang
Kec. Bogor Selatan	Kec. Ciwaringin	Kec. Cimahi Selatan	Kec. Cisalak
Kota Bogor	Kab. Cirebon	Kota Cimahi	Kab. Subang
Kec. Cikole	Kec. Majalengka	Kec. Batujajar	Kec. Campaka
Kota Sukabumi	Kab. Majalengka	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

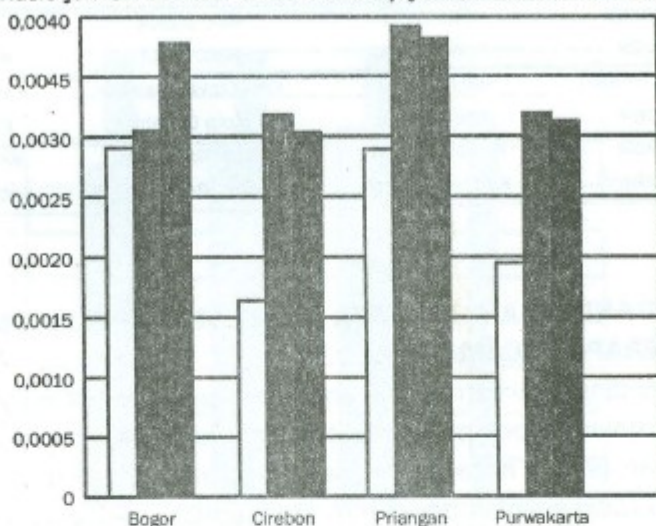
B. PERBANDINGAN KINERJA INDIKATOR PELAYANAN UNTUK BEBERAPA KECAMATAN

Perbandingan ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa prestasi setiap kecamatan dalam aspek pelayanan tidak sama. Sebagai contoh, *Grafik 6.5 menunjukkan bahwa Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Kadudampit mempunyai rasio sekolah dasar terhadap jumlah anak usia sekolah dasar lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga pelayanan pendidikan diharapkan lebih baik. Sementara itu, di Kecamatan Jatitujuh jumlah sekolah dasar masih relatif sedikit dibandingkan jumlah anak usia sekolah dasar.* Selanjutnya, untuk melihat perbandingan kinerja pelayanan antar kecamatan, diambil beberapa indikator yang dianggap dapat mewakili. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio jumlah Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar
2. Rasio jumlah guru Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar
3. Rasio jumlah guru SLTP terhadap jumlah anak usia SLTP
4. Rasio jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005
5. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005
6. Rasio jumlah tenaga kesehatan lainnya terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005

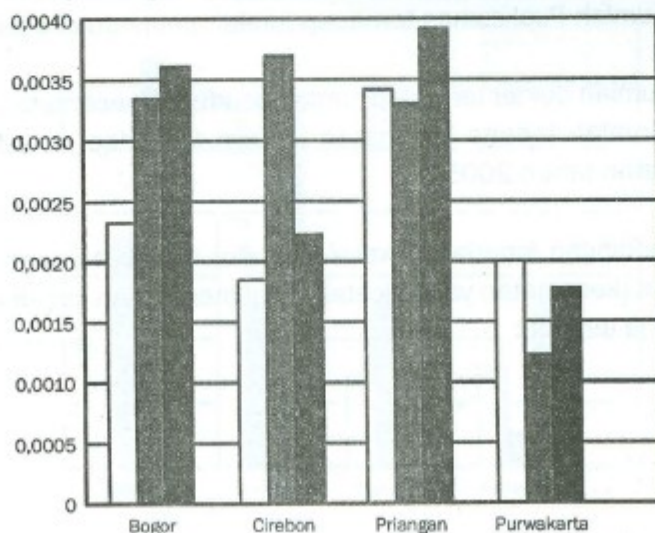
Perbandingan kinerja indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada grafik berikut (kecamatan yang dicetak tebal merupakan kecamatan dengan indeks kinerja terbaik):

Grafik 6.5. Rasio jumlah Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar



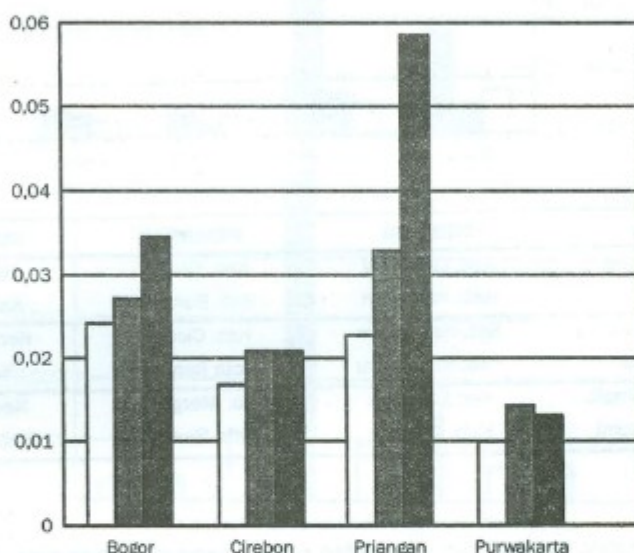
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Ciseeng	Kec. Jatitujuh	Kec. Kawalu	Kec. Campaka
Kab Bogor		Kota Tasikmalaya	Kab. Purwakarta
Kec. Sukaraja	Kec. Haurgeulis	Kec. Mekarmukti	Kec. Sukatani
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kab. Garut	Kab. Purwakarta
Kec. Kadudampit	Kec. Susukan	Kec. Margahayu	Kec. Bungursari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandun	Kab. Purwakarta

Grafik 6.6. Rasio jumlah guru Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar



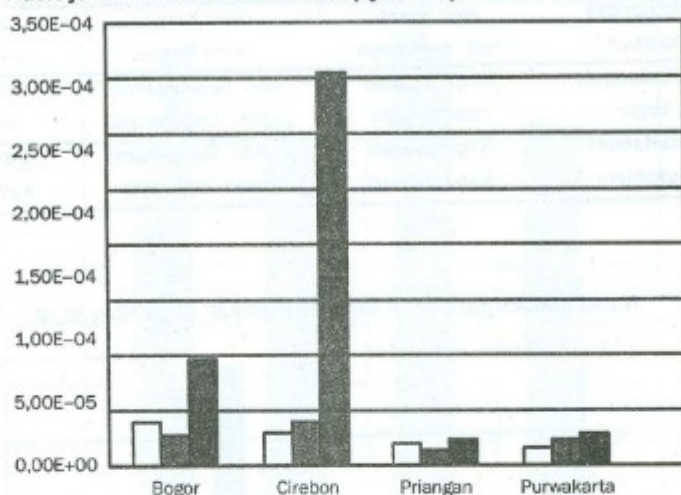
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Kebonpedes	Kec. Sukra	Kec. Banjar	Kec. Banyusari
Kab. Sukabumi	Kab. Indramayu	Kota Banjar	Kab. Karawang
Kec. Cibinong	Kec. Pabuaran	Kec. Bojongsambir	Kec. Blanakan
Kab. Bogor	Kab. Cirebon	Kab. Tasikmalaya	Kab. Subang
Kec. Kadudampit	Kec. Susukan	Kec. Margahayu	Kec. Bungursari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.7. Rasio jumlah guru SLTP terhadap jumlah anak usia SLTP



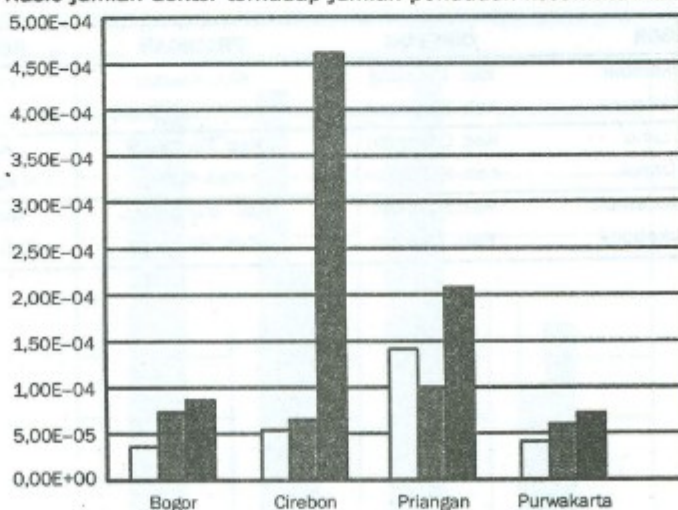
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Cikembar	Kec. Cipicung	Kec. Kawalu	Kec. CibogoK
Kab. Sukabumi	Kab. Kuningan	Kota Tasikmalaya	ab. Subang
Kec. Limo	Kec. Cibingbin	Kec. Peundeuy	Kec. Ciasem
Kota Depok	Kab. Kuningan	Kab. Garut	Kab. Subang
Kec. Kadudampit	Kec. Susukan	Kec. Margahayu	Kec. Bungursari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.8. Rasio jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005



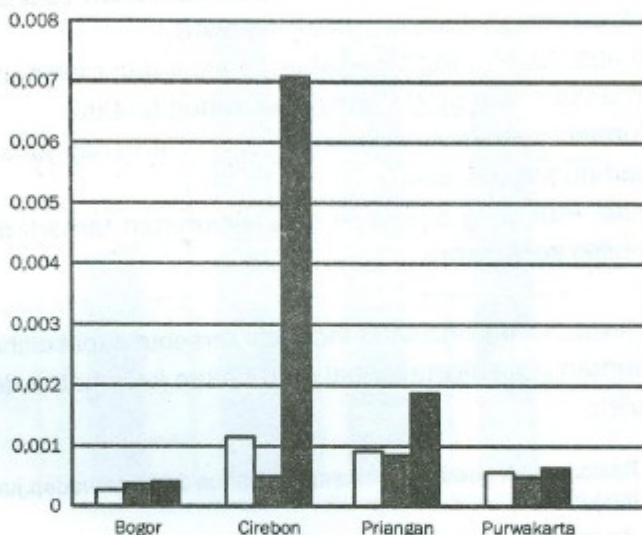
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Cibinong	Kec. Luragung	Kec. Cileunyi	Kec. Batujaya
Kab. Bogor	Kab. Kuningan	Kab. Bandung	Kab. Karawang
Kec. Sukaraja	Kec. Haurgeulis	Kec. Cicendo	Kec. Pamanukan
Kab. Bogor	Kab. Indramayu	Kota Bandung	Kab. Subang
Kec.Kadudampit	Kec.Susukan	Kec. Margahayu	Kec.Bungursari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.9. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005



BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Babakan Madang	Kec. Luragung	Kec. Pataruman	Kec. Legonkulon
Kab. Bogor	Kab. Kuningan	Kota Banjar	Kab. Subang
Kec. Cikole	Kec. Haurgeulis	Kec. Indihiang	Kec. Rawameta
Kota Sukabumi	Kab. Indramayu	Kota Tasikmalaya	Kab. Karawang
Kec. Kadudampit	Kec. Susukan	Kec. Margahayu	Kec. Bungursari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

Grafik 6.10. Rasio jumlah tenaga kesehatan lainnya terhadap jumlah penduduk kecamatan tahun 2005



BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Cibinong	Kec. Cipicung	Kec. Pataruman	Kec. Cijambe
Kab. Bogor	Kab. Kuningan	Kota Banjar	Kab. Subang
Kec. Nanggung	Kec. Haurgeulis	Kec. Cimahi Tengah	Kec. Batujaya
Kab. Bogor	Kab. Indramayu	Kota Cimahi	Kab. Karawang
Kec. Kadudampit	Kec. Susukan	Kec. Margahayu	Kec. Bungursari
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Purwakarta

C. PERBANDINGAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN UNTUK BEBERAPA KECAMATAN

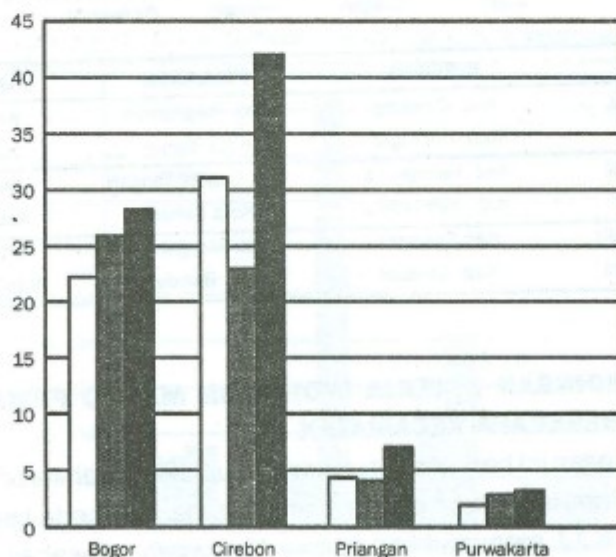
Perbandingan ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa prestasi setiap kecamatan dalam indikator makro pembangunan berbeda-beda. Sebagai contoh, Grafik 6.11 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukahaji mempunyai prosentase penduduk miskin yang lebih kecil (rasio penduduk terhadap

penduduk miskin yang lebih besar) dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Sementara itu, Kecamatan pedes mempunyai prosentase penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Selanjutnya, Untuk melihat perbandingan kinerja indikator makro pembangunan antar kecamatan, diambil beberapa indikator yang dianggap dapat mewakili. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio jumlah penduduk kecamatan tahun 2005 terhadap jumlah penduduk miskin
2. Rasio murid Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar (Total yang sekolah dan yang tidak sekolah)
3. Rasio murid SD/MI yang lulus tahun terakhir dan melanjutkan ke SLTP/MTs terhadap murid SD/MI yang lulus tahun terakhir
4. Rasio jumlah penduduk yang ikut memilih terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih
5. Rasio nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan terhadap potensi PBB yang dimiliki kecamatan

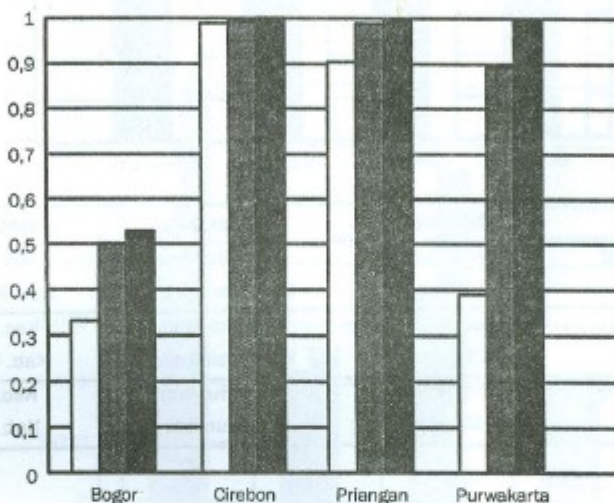
Perbandingan kinerja indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada grafik berikut (kecamatan yang dicetak tebal merupakan kecamatan dengan indeks kinerja terbaik):

Grafik 6.11. Rasio jumlah penduduk kecamatan tahun 2005 terhadap jumlah penduduk miskin



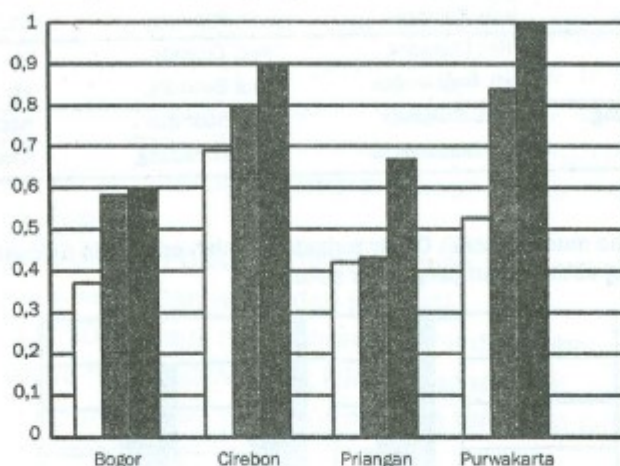
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Surade	Kec. Luragung	Kec. Solokanjeruk	Kec. Pedes
Kab. Sukabumi	Kab. Kuningan	Kab. Bandung	Kab. Karawang
Kec. Cigudeg	Kec. Cigasong	Kec. Cicendo	Kec. Batujaya
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kota Bandung	Kab. Karawang
Kec. Megamendung	Kec. Sukahaji	Kec. Buahdua	Kec. Cisalak
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kab. Sumedang	Kab. Subang

Grafik 6.12. Rasio murid Sekolah Dasar terhadap jumlah anak usia Sekolah Dasar (Total yang sekolah dan yang tidak sekolah)



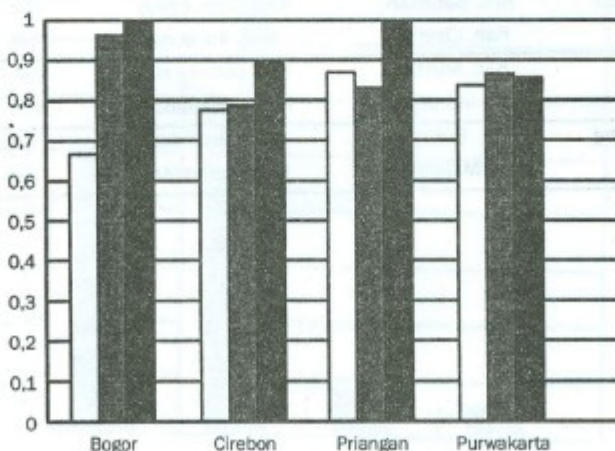
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Palabuhanratu	Kec. Babakan	Kec. Cipeundeuy	Kec. Jayakarta
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Karawang
Kec. Cidolog	Kec. Anjatan	Kec. Sodong Hilir	Kec. Banyusari
Kab. Sukabumi	Kab. Indramayu	Kab. Tasikmalaya	Kab. Karawang
Kec. Megamendung	Kec. Sukahaji	Kec. Buahdua	Kec. Cisalak
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kab. Sumedang	Kab. Subang

Grafik 6.13. Rasio murid SD/MI yang lulus tahun terakhir dan melanjutkan ke SLTP/MTs terhadap murid SD/MI yang lulus tahun terakhir



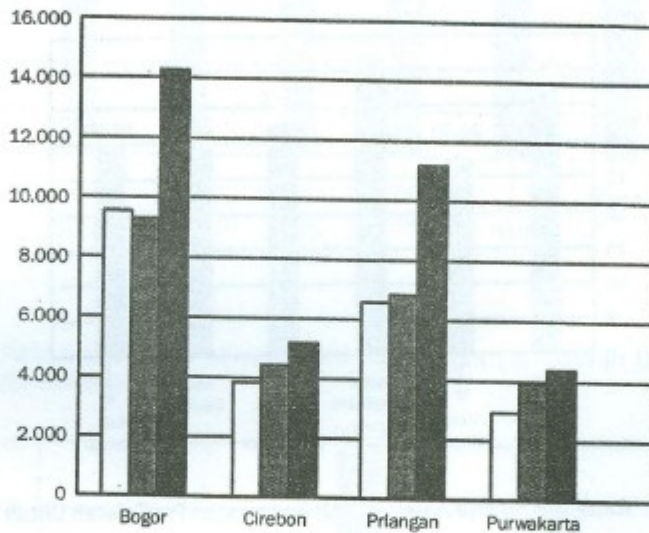
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Bantargadung	Kec. Beber	Kec. Cikatomas	Kec. Maniis
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Tasikmalaya	Kab. Purwakarta
Kec. Gegerbitung	Kec. Darma	Kec. Sukarame	Kec. Ciampel
Kab. Sukabumi	Kab. Kuningan	Kab. Tasikmalaya	Kab. Karawang
Kec. Megamendung	Kec. Sukahaji	Kec. Buahdua	Kec. Cislak
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kab. Sumedang	Kab. Subang

Grafik 6.14. Rasio jumlah penduduk yang ikut memilih terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih



BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Cikakak	Kec. Babakan	Kec. Cipeundeuy	Kec. Batujaya
Kab. Sukabumi	Kab. Cirebon	Kab. Bandung	Kab. Karawang
Kec. Tanah sereal	Kec. Anjatan	Kec. Sodong Hilir	Kec. Pondoksalam
Kota Bogor	Kab. Indramayu	Kab. Tasikmalaya	Kab. Purwakarta
Kec. Megamendung	Kec. Sukahaji	Kec. Buahdua	Kec. Cisalak
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kab. Sumedang	Kab. Subang

Grafik 6.15. Rasio nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan terhadap potensi PBB yang dimiliki kecamatan



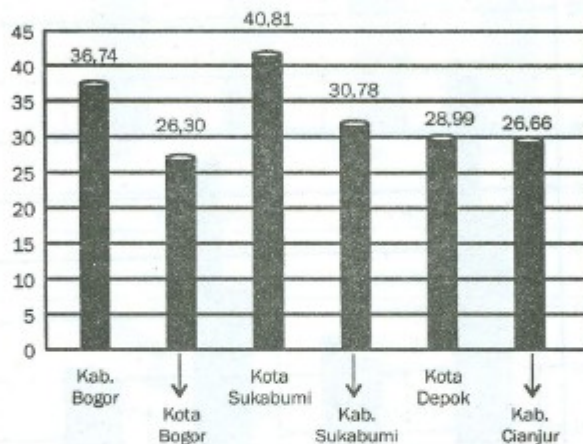
BOGOR	CIREBON	PRIANGAN	PURWAKARTA
Kec. Sukamakmur	Kec. Ciwaringin	Kec. Cibeureum	Kec. Batujaya
Kab. Bogor	Kab. Cirebon	Kota Tasikmalaya	Kab. Karawang
Kec. Gunung Puyuh	Kec. Bangodua	Kec. Garut Kota	Kec. Banyusari
Kota Sukabumi	Kab. Indramayu	Kab. Garut	Kab. Karawang
Kec. Megamendung	Kec. Sukahaji	Kec. Buahdua	Kec. Cisalak
Kab. Bogor	Kab. Majalengka	Kab. Sumedang	Kab. Subang

D. PERBANDINGAN RATA-RATA KINERJA ADMINISTRATIF KECAMATAN ANTAR DAERAH

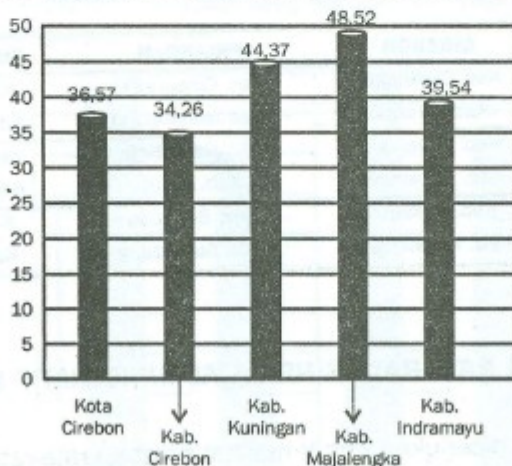
Perbandingan ini diperlukan untuk melihat prestasi rata-rata kecamatan pada setiap daerah untuk aspek administratif. Selain itu, grafik-grafik di bawah ini dapat menunjukkan daerah mana yang unggul dan daerah mana yang masih

perlu diperbaiki dalam aspek administratif. Sebagai contoh, Grafik 6.16 memperlihatkan bahwa kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Sukabumi secara umum lebih unggul dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Wilayah Bogor dalam kinerja administratifnya. Kemudian, kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bogor perlu mengejar ketertinggalannya dari kecamatan lain yang ada di Wilayah Bogor dalam hal kinerja administratif. Berikut ini grafik-grafik perbandingannya secara lengkap.

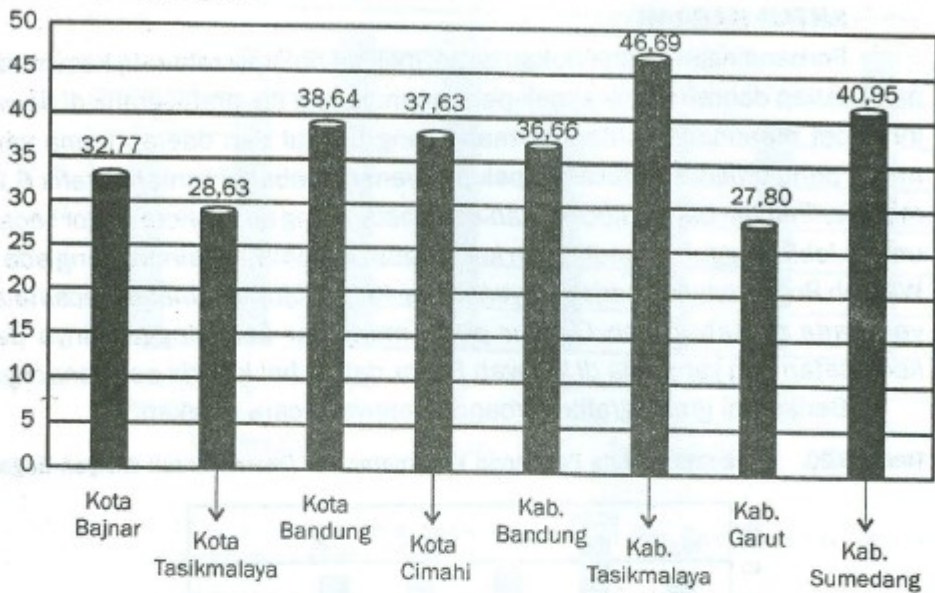
Grafik 6.16. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Bogor



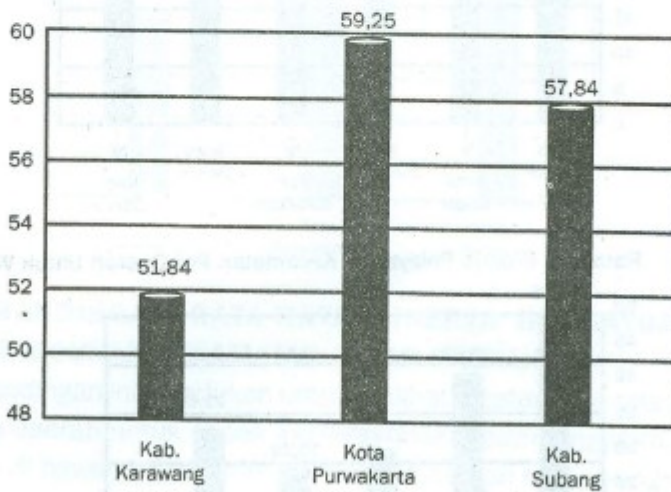
Grafik 6.17. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Cirebon



Grafik 6.18. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Priangan



Grafik 6.19. Rata-rata Kinerja Administratif Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Purwakarta

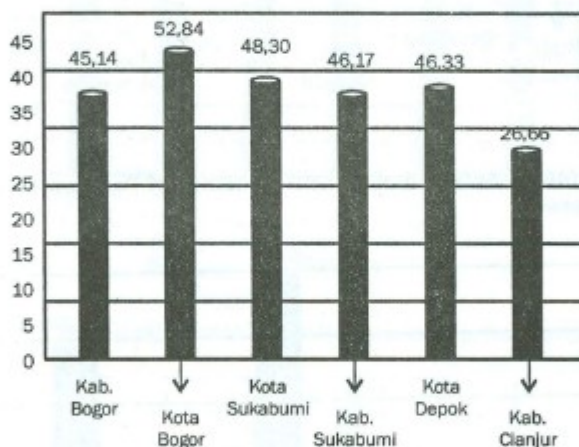


E. PERBANDINGAN RATA-RATA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ANTAR DAERAH

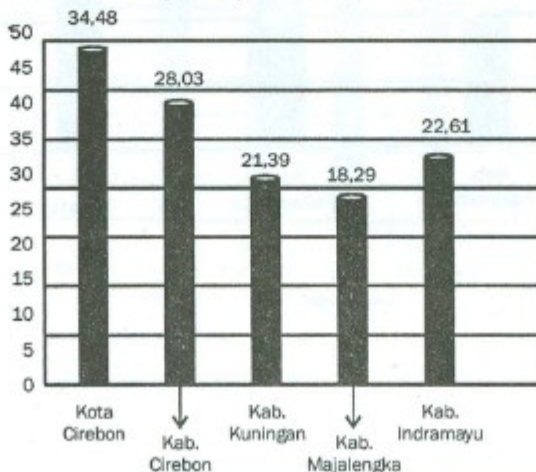
Perbandingan ini diperlukan untuk melihat prestasi rata-rata kecamatan pada setiap daerah untuk aspek pelayanan. Selain itu, grafik-grafik di bawah ini dapat menunjukkan daerah mana yang unggul dan daerah mana yang masih perlu diperbaiki dalam aspek pelayanan. Sebagai contoh, Grafik 6.20 memperlihatkan bahwa kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bogor secara umum lebih unggul dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Wilayah Bogor dalam kinerja pelayanannya. Kemudian, kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur perlu mengejar ketertinggalannya dari kecamatan lain yang ada di Wilayah Bogor dalam hal kinerja pelayanannya.

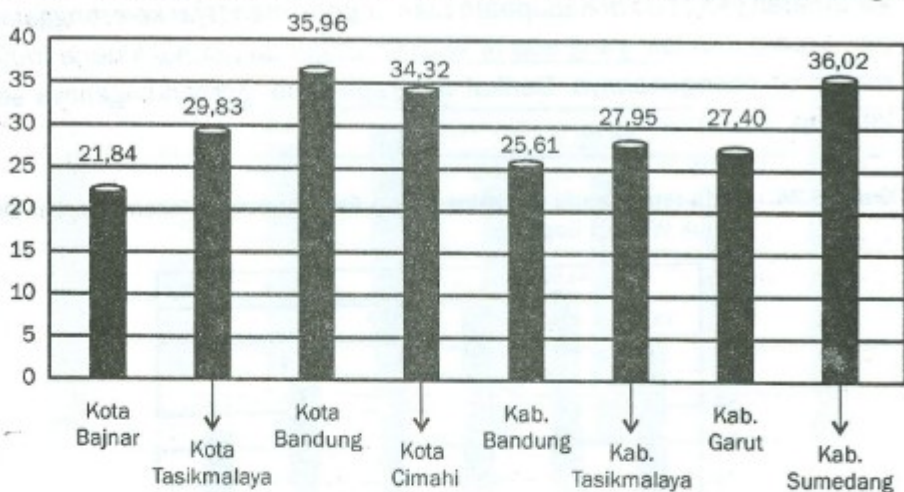
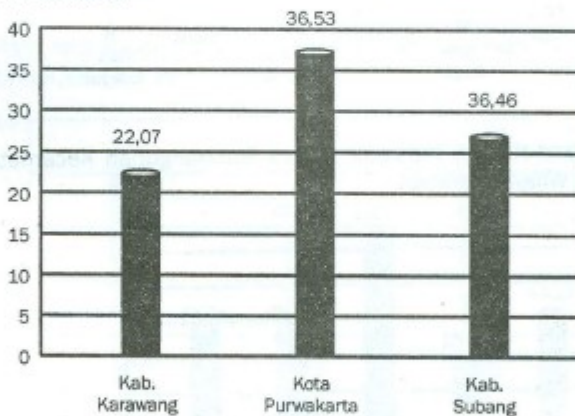
Berikut ini grafik-grafik perbandingannya secara lengkap.

Grafik 6.20. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Bogor



Grafik 6.21. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Cirebon



Grafik 6.22. Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Priangan**Grafik 6.23.** Rata-rata Kinerja Pelayanan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Purwakarta

F. PERBANDINGAN RATA-RATA KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KECAMATAN ANTAR DAERAH

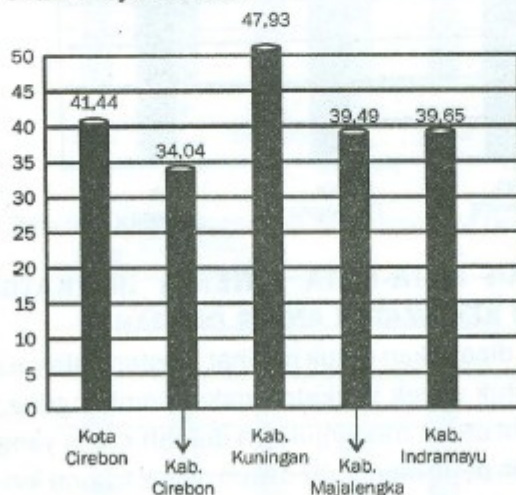
Perbandingan ini diperlukan untuk melihat prestasi rata-rata kecamatan pada setiap daerah untuk aspek indikator makro pembangunan. Selain itu, grafik-grafik di bawah ini dapat menunjukkan daerah mana yang unggul dan daerah mana yang masih perlu diperbaiki dalam aspek kinerja indikator makro pembangunan. Sebagai contoh, Grafik 6.24 memperlihatkan bahwa kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bogor secara umum lebih unggul dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Wilayah Bogor dalam kinerja indikator makro pembangunannya. Sementara itu, kecamatan-

kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur perlu mengejar ketertinggalannya dari kecamatan lain yang ada di Wilayah Bogor dalam hal kinerja indikator makro pembangunannya. Berikut ini grafik-grafik perbandingannya secara lengkap.

Grafik 6.24. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Bogor



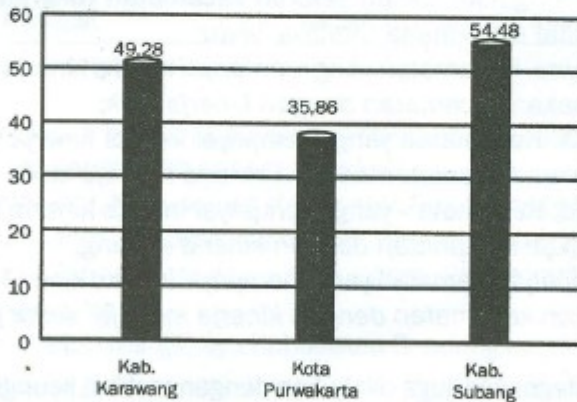
Grafik 6.25. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Cirebon



Grafik 6.26. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Priangan



Grafik 6.27. Rata-rata Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kecamatan Per Daerah Untuk Wilayah Purwakarta



BAB VII PENUTUP

Sebagai kata akhir dari evaluasi ini, perlu ditegaskan kembali bahwa kinerja suatu kecamatan tidak dibandingkan dengan standar yang telah baku. Sebagai pembanding dalam hal ini adalah kinerja kecamatan tertinggi dan terendah. Dengan demikian, jika suatu kecamatan mendapatkan indeks kinerja baik parsial (per aspek) ataupun total (keseluruhan) sebesar 0 tidak berarti bahwa kinerja kecamatan tersebut adalah nol, melainkan terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dalam wilayahnya (Bakorwil). Demikian juga, jika suatu kecamatan mendapatkan nilai indeks 100, bukan berarti kinerja kecamatan tersebut telah optimal, melainkan kinerja tertinggi diantara kecamatan lainnya di wilayahnya (Bakorwil).

Nilai indeks suatu kecamatan yang diperoleh sangat tergantung kepada keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan dalam instrumen yang telah disebarkan sebelumnya. Jika data tersebut tidak akurat dan tidak lengkap, maka nilai indeksnya pun tidak akan tepat menggambarkan kondisi riil kecamatan yang bersangkutan.

Seandainya, data-dan informasi yang disampaikan benar, maka hasil evaluasi ini telah mengelompokkan seluruh kecamatan yang ada ke dalam empat kategori dilihat dari kinerja totalnya, yaitu:

- *Kategori pertama*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 76-100 dinamakan *kecamatan dengan kinerja baik*;
- *Kategori kedua*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 51-75 dinamakan *kecamatan dengan kinerja menuju baik*;
- *Kategori ketiga*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 26-50 dinamakan *kecamatan dengan kinerja sedang*;
- *Kategori keempat*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 0-25 dinamakan *kecamatan dengan kinerja menuju sedang*;

Selain itu, kategorisasi juga dilakukan dengan melihat keunggulan setiap kecamatan pada masing-masing aspek. Pembandingan bukan dilakukan antar kecamatan, melainkan antar aspek dalam satu kecamatan, sehingga setiap kecamatan akan memperoleh satu predikat. Atas dasar hal tersebut maka kecamatan-kecamatan yang ada dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- *Kategori pertama*, Kecamatan yang unggul dalam aspek administratif (inputs), dinamakan "*Kecamatan Potensial*";
- *Kategori kedua*, Kecamatan yang unggul dalam aspek pelayanan (output), dinamakan "*Kecamatan Pengabdian*";

- *Kategori ketiga*, Kecamatan yang unggul dalam kinerja indikator makro pembangunan, dinakanan “*Kecamatan Menuju Kesejahteraan*”.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja kecamatan yang meliputi 3 aspek yaitu aspek administrative sebagai inputs, aspek kinerja pelayanan sebagai outputs, dan aspek kinerja indikator makro pembangunan sebagai outcomes, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peringkat pertama aspek administrative (inputs) per wilayah ditempati oleh kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk Wilayah Bogor;
- Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka untuk Wilayah Cirebon;
- Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta untuk Wilayah Purwakarta;
- Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung untuk Wilayah Priangan.

Tabel 6.1
Kecamatan Yang Unggul Pada Aspek Administratif

Wilayah	Aspek Administratif (IKA)
Bogor	Kecamatan Cikole (Kab. Sukabumi)
Cirebon	Kecamatan Majalengka (Kab. Majalengka)
Purwakarta	Kecamatan Campakan (Kab. Purwakarta)
Priangan	Kecamatan Batujajar (Kab. Bandung)

2. Peringkat pertama aspek pelayanan (outputs) per wilayah ditempati oleh kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Wilayah Bogor;
- Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Wilayah Cirebon;
- Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta untuk Wilayah Purwakarta;
- Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Wilayah Priangan;

Tabel 6.2
Kecamatan Yang Unggul Pada Aspek Pelayanan

Wilayah	Aspek Administratif (IKP)
Bogor	Kecamatan Kadudampit (Kab. Sukabumi)
Cirebon	Kecamatan Susukan (Kab. Cirebon)
Purwakarta	Kecamatan Bungursari (Kab. Purwakarta)
Priangan	Kecamatan Margahayu (Kab. Bandung)

3. Peringkat pertama aspek indikator makro pembangunan (outcomes) per wilayah ditempati oleh kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
 - Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor untuk Wilayah Bogor;
 - Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka untuk Wilayah Cirebon;
 - Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Wilayah Purwakarta;
 - Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang untuk Wilayah Priangan;

Tabel 6.3
Kecamatan Yang Unggul Pada Aspek Indikator Makro

Wilayah	Aspek Administratif (IKMP)
Bogor	Kecamatan Megamendung (Kab. Bogor)
Cirebon	Kecamatan Sukahaji (Kab. Majalengka)
Purwakarta	Kecamatan Cisalak (Kab. Subang)
Priangan	Kecamatan Buahdua (Kab. Sumedang)

4. Atas dasar pemeringkatan setiap aspek tersebut, selanjutnya ditentukan pemeringkatan secara keseluruhan berdasarkan tiga aspek sebagaimana disebutkan di atas. Dengan memberikan bobot untuk inputs, outputs, dan outcomes masing-masing 25%, 30%, dan 45%, diperoleh peringkat pertama kecamatan per wilayah sebagai berikut:
 - Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor untuk Wilayah Bogor;
 - Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Wilayah Cirebon;
 - Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Wilayah Purwakarta;
 - Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Wilayah Priangan;
5. Selanjutnya, pemeringkatan akhir dilakukan dengan memasukkan pertimbangan aspek kualitatif yang secara riil mempunyai prospek yang baik terhadap peningkatan kinerja outputs dan outcomes di masa yang akan datang. Ada 5 aspek kualitatif yang menjadi pertimbangan yaitu:
 - Keberadaan kelembagaan kecamatan atau desa/kelurahan yang dibentuk untuk tujuan pengembangan potensi kecamatan atau desa/kelurahan yang dimiliki;
 - Partisipasi/inisiatif masyarakat dalam pembentukan kelembagaan tersebut;
 - Pemanfaatan teknologi khususnya teknologi computer;
 - Keberadaan media untuk melakukan publikasi kepada masyarakat;
 - Keberadaan keputusan camat yang bersifat pengaturan terhadap masyarakat;
6. Setiap aspek kualitatif diberikan bobot 20%, sehingga jika suatu kecamatan memiliki kelima aspek tersebut, maka indeks kuantitatif yang didapatkan dikalikan dengan angka 100, demikian juga jika suatu

kecamatan hanya memiliki 1 aspek maka dikalikan dengan 20. Hasil akhir perhitungan menetapkan peringkat kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk Wilayah Bogor;
- Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Wilayah Cirebon;
- Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta untuk Wilayah Purwakarta;
- Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang untuk Wilayah Priangan.

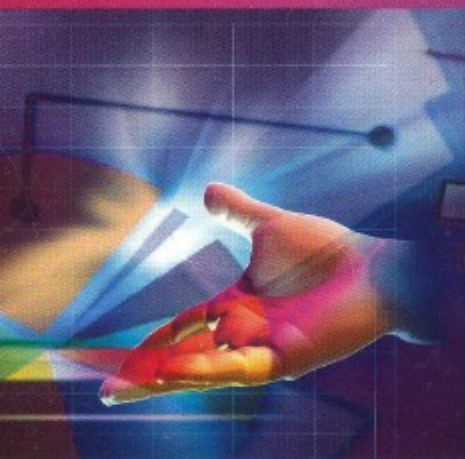
Tabel 6.4
Kecamatan Yang Unggul Secara Umum

Wilayah	Aspek Administratif (IKA)
Bogor	Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
Cirebon	Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
Purwakarta	Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
Priangan	Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang

7. Terhadap kecamatan-kecamatan yang mempunyai prestasi unggul dalam setiap aspek diberikan predikat sebagai berikut:
 - Kecamatan yang unggul dalam aspek administratif (inputs), dinamakan "*Kecamatan Potensial*";
 - Kecamatan yang unggul dalam aspek pelayanan (outputs), dinamakan "*Kecamatan Pengabdian*";
 - Kecamatan yang unggul dalam kinerja indikator makro pembangunan, dinamakan "*Kecamatan Menuju Sejahtera*".

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001), Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001: *Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia*.
- DeVrye, Catherine (1994), *Good Service is Good Business, 7 simple Strategies for Success*, Australia, Prentice Hall.
- Flynn, Norman, *Public Sector Management*, (1990), London : Harvester Wheatsheaf
- Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, (1986), *Organization Theory for Public Administration*, Canada : Little, Brown & Company
- Haynes Robert J. (1980), *Organisation Theory and Local government*, George Allen & Unwin Ltd, london.
- Hudson, Catheryn Seckler, (1955), *Organization and Management : Theory and Practice*, Washington DC : The American University Press
- Kartiwa Asep, (2002), *Birokrasi dan Konsep Pelayanan Publik Dalam Otonomi Daerah*, Makalah, FISIP UNPAD
- Lembaga Administrasi Negara (2000), *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 3 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*.
- Lembaga Administrasi Negara (2003), *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*, LAN, Jakarta
- Lovelock, ChristopherH. 1992. *Managing Service*, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall.
- Nugraha (2004), Makalah Berjudul "Standarisasi Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik", UNPAD.
- Sobandi, Baban (2004), *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis dan Profesionalisme Birokrasi*, Humaniora Utama Press.
- Sobandi, Baban, *Model Pengukuran Beban Kerja Organisasi* (dalam Modul Diklat Penataan Kelembagaan), Lembaga Administrasi Negara, PKP2A I LAN Bandung, 2004.
- Sobandi, Baban (2004), *Pengukuran Kinerja Organisasi* (dalam Modul Diklat Teknik Analisis Manajemen), Lembaga Administrasi Negara, PKP2A I LAN Bandung.



Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2005